

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Volume 2, Nomor 1, Juni 2025

1. ***Collaborative Governance*** Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar
Denny Iswanto
2. ***Spatial Concentration Of Micro and Small Industries (MSIs) in Blitar Regency***
Lu'lu'il Munawaroh: Mohammad Mansyur
3. **Peluang Blitar Raya Sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Baru di Wilayah Bagian Selatan Provinsi Jawa Timur**
Kevie Desderius: Calvin Napoleon Bonaparte Lepa Magana
4. **Dinamika Kebijakan Penerapan PNBPN Dalam Pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Blitar**
Caesar Demas Edwinarta
5. **Studi Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Timur**
Evita Dianasukma: Hasti Aringga Suminar

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2025

Penanggung Jawab

Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, M.E.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Ketua Editor (*Editor-in-Chief*)

Arisanti, S.S.T.P., M.M.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Ir. Tri Kurniastuti, M.M.A.
Universitas Islam Balitar Blitar

Cindya Alfi, M.Pd.
*Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar*

Mayuko Galuh Mahardika, S.I.P., M.I.P.
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya*

Moh. Alqhoswatu Taufik, M.Pd.
*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
Al Muslihuun Tlogo Blitar*

Ni'ma Kholila, S.Pd., M.Cs.
*Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Putra Sang Fajar Blitar*

Associate Editor

Yuni Purwita Sari, S.T., M.A.P.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Yusti Andriari. S.Si.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Fera Tara Batari, S.I.Kom.
*Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar*

Harry Bali Kusuma, S.Kom.
*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Blitar*

Mitra Bestari (Peer-Reviewers)

Mayuko Galuh Mahardika, S.I.P., M.I.P.

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya*

Joko Budi Santoso, S.E., M.E.

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya*

Cindya Alfi, M.Pd.

*Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar*

Ratnaningsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev.

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya*

Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, M.Si.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Sekretariat

Agus Sugeng Jaka S., S.Sos., M.M.

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Nila Faricha. S.E.

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Sigit Ardianto

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2025

DAFTAR ISI

- 1-12 ***Collaborative Governance*** dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar
Denny Iswanto
- 13-20 ***Spatial Concentration of Micro and Small Industries (MSIs) in Blitar Regency***
Lu'lu'il Munawaroh; Mohammad Mansyur
- 21-36 **Peluang Blitar Raya sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Baru di Wilayah Bagian Selatan Provinsi Jawa Timur**
Kevie Desderius; Calvin Napoleon Bonaparte Lepa Magana
- 37-47 **Dinamika Kebijakan Penerapan PNBPN Dalam Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Blitar**
Caesar Demas Edwinarta
- 48-57 **Studi Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Timur**
Evita Dianasukma; Hasti Aringga Suminar



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar

Denny Iswanto ¹

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia¹
dennyiswant@gmail.com

Abstract

Health issues, especially those related to HIV/AIDS, are global challenges that require collaborative handling. In Indonesia, HIV/AIDS has become a serious issue since the first case was discovered in 1987. Blitar City is also facing a similar problem with a significant increase in the number of HIV/AIDS cases. This research aims to analyze collaborative governance in overcoming HIV/AIDS in Blitar City, with a focus on collaboration between the government, non-governmental organizations (NGOs), civil society organizations, and related communities. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through analysis of documents related to HIV/AIDS management policies, such as Presidential Regulation Number 75 of 2006 and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2007 and other documents that support evidence of HIV/AIDS management in Blitar City. The research results show that cross-sector collaboration has made a significant contribution to increasing public awareness, expanding access to health services, and reducing stigma towards people living with HIV/AIDS (PLWHA). However, there are still obstacles such as low public knowledge about HIV/AIDS, social stigma, and limited resources. This research concludes that the successful implementation of Collaborative Governance in overcoming HIV/AIDS depends on the active involvement of all parties, increasing public understanding, and strengthening coordination between stakeholders. The proposed recommendations include improving community education, strengthening institutional capacity, and providing inclusive and sustainable health services for PLWHA.

Keywords: HIV/AIDS; Collaborative Governance; prevention; stigma

Abstrak

Masalah kesehatan, terutama terkait dengan HIV/AIDS, merupakan tantangan global yang membutuhkan penanganan kolaboratif. Di Indonesia, HIV/AIDS telah menjadi isu serius sejak kasus pertama ditemukan pada tahun 1987. Kota Blitar juga menghadapi permasalahan serupa dengan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *case study*. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, seperti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 dan dokumen lain yang mendukung terhadap *evidence*

INFORMASI ARTIKEL

Naskah diterima: 04/02/2025

Revisi: 11/04/2025

Diterima untuk dipublikasi: 16/04/2025

doi: -

© 2025 Jurnal Pradah

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40,
Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117

Telepon: (0342) 808165

Fax: (0342) 806275

E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

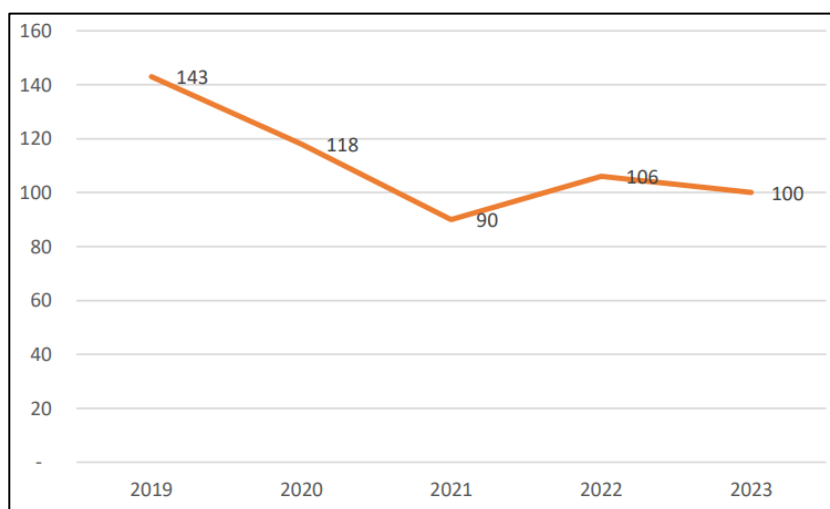
penanganan HIV/AIDS di Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses terhadap layanan kesehatan, dan mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Namun, masih terdapat kendala, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *Collaborative Governance* dalam penanggulangan HIV/AIDS bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, peningkatan pemahaman masyarakat, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk ODHA.

Kata Kunci: HIV/AIDS; *Collaborative Governance*; penanggulangan; stigma

PENDAHULUAN

Salah satu isu utama dalam sektor kesehatan yang memerlukan perhatian khusus adalah penyakit menular seksual HIV/AIDS. Sebagai penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, HIV/AIDS tidak hanya menjadi masalah kesehatan tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat. Sejak pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1987, kasus HIV/AIDS terus meningkat, menunjukkan kompleksitas dalam pencegahan dan penanganannya (Muthmainnah, 2024). Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 terdapat 50.282 kasus HIV baru, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi secara nasional. HIV/AIDS menimbulkan tantangan besar, terutama dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan pengurangan stigma (Salbila & Usiono, 2023). Penyebaran virus ini sebagian besar terjadi melalui cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, sperma, dan air susu ibu, sehingga memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Salah satu daerah yang concern terhadap isu HIV/AIDS adalah Kota Blitar. Kota Blitar, yang mulai mencatatkan kasus HIV/AIDS pada tahun 2009, menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dalam lima tahun terakhir kasus HIV/AIDS di Kota Blitar mengalami fluktuasi.



Gambar 1. Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Blitar Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan (2023)

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Blitar menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, meskipun sejumlah upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan. Meskipun penanganan terhadap penderita yang ditemukan menjadi fokus utama, upaya pencegahan juga harus diperhatikan dengan serius. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah melalui tes HIV pada darah donor untuk memastikan tidak ada penularan melalui darah yang terinfeksi. Selain itu, pemantauan dan pengobatan terhadap penderita penyakit menular seksual (PMS) menjadi bagian penting dari upaya pencegahan

penularan HIV. Kelompok yang berisiko tinggi terinfeksi HIV juga harus diperhatikan, di antaranya ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), homoseksual, penjaja seks, pengguna narkoba suntik (penasun), transgender/waria, dan nabi/ Penghuni lembaga pemasyarakatan (Nevendorff et al., 2023). Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa risiko penularan HIV jauh lebih tinggi pada kelompok tertentu. Misalnya, pria yang berhubungan seks dengan pria lainnya memiliki risiko penularan HIV 16 kali lebih tinggi, sementara pengguna narkoba suntik memiliki risiko 29 kali lebih tinggi. Pekerja seks juga memiliki risiko 30 kali lebih tinggi, dan kelompok transgender memiliki risiko 13 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya (Pemerintah Kota Blitar, 2024).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai pihak dan sektor, serta didasarkan pada data yang valid mengenai kelompok berisiko tinggi ini. Pemerintah daerah, bersama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas terkait, harus memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS tidak hanya terbatas pada penanggulangan dampaknya, tetapi juga dilakukan secara proaktif melalui strategi pencegahan yang tepat sasaran bagi kelompok berisiko (Nilamsari, 2023). Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) di Kota Blitar pada tahun 2010 merupakan langkah pertama yang diambil pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV/AIDS (Winarni et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007, KPAD memiliki tugas untuk mengkoordinasikan promosi, pencegahan, konseling, pengobatan, perawatan, serta dukungan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Nurchayningsih et al., 2021). Namun, keberhasilan upaya ini memerlukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, komunitas, dan perguruan tinggi.

Seiring berjalannya waktu, kolaborasi yang melibatkan banyak pihak menjadi semakin penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pemerintahan kolaboratif dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar. Pendekatan kolaboratif, yang melibatkan berbagai sektor dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis data yang akurat (Fauzi & Rahayu, 2019). Kolaborasi yang efektif dalam penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada kemampuan para pihak yang terlibat untuk bekerja bersama dengan tujuan yang sama (Turi & Fitriana, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar.

Model tata kelola pemerintahan kolaboratif menurut Ansell dan Gash, yang mencakup empat variabel utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif, akan digunakan sebagai landasan teori untuk memahami dinamika kolaborasi ini (Handayani et al., 2023). Dengan melihat pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan HIV/AIDS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar, serta memperkuat model tata kelola pemerintahan kolaboratif yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Praktik *collaborative governance* menjadi relevan untuk mengatasi permasalahan ini. Konsep ini menekankan pada kerja sama lintas sektor, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, serta pembagian tanggung jawab untuk mencapai tujuan Bersama (Noor et al., 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud sinergi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar. Fokus penelitian meliputi peran masing-masing pemangku kepentingan, mekanisme kolaborasi yang diterapkan, serta tantangan dan solusi dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi angka kasus HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup ODHA di Kota Blitar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar. Instrumen pengukuran yang digunakan melalui analisis dokumen terkait. Metode *secondary data analysis* berupa

analisis dokumen kebijakan serta laporan program terkait (Iswanto & Pamungkas, 2023). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi antar pihak. Proses analisis ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori *collaborative governance*, yang berfokus pada elemen-elemen seperti partisipasi *stakeholder*, pengambilan keputusan bersama, saling percaya, dan akuntabilitas.

Analisis data difokuskan pada evaluasi sejauh mana praktik *collaborative governance* telah diterapkan dan bagaimana hal ini memengaruhi efektivitas penanggulangan HIV/AIDS. Analisis juga membahas implikasi kolaborasi lintas sektor terhadap pencapaian tujuan program, seperti pengurangan stigma, peningkatan akses layanan kesehatan, dan keberlanjutan program. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian didasarkan pada data yang valid dan relevan, serta dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam konteks pengelolaan kolaboratif untuk masalah kesehatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola pemerintahan kolaboratif menurut Ansell dan Gash adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan aktor pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan publik dan penyelesaian masalah publik. Dalam konsep *collaborative governance* biasanya melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta, namun tata kelola pemerintah kolaboratif yang diterapkan di Kota Blitar sebagai upaya mengatasi HIV/AIDS hanya melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat, akademisi dan NGO/LSM.

Untuk membahas bagaimana bentuk dan proses *collaborative governance* dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar, peneliti akan menyajikan data hasil penelitian yang mengacu pada teori Ansell and Gash terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif.

Starting Condition (Kondisi Awal)

Keadaan awal memiliki peran penting dalam menentukan suksesnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Selain itu, fase ini berfungsi untuk menilai apakah kerja sama diperlukan dan dapat diwujudkan. Kondisi awal munculnya terdeteksi HIV/AIDS di Kota Blitar pada tahun 2009, jumlah penderita yang melakukan pengobatan mencapai angka 725 orang. Dari sini peran *stakeholders* diperlukan untuk mengatasinya. Pertama, peranan Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Keterlibatan *stakeholder* pada saat itu hanya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam mengatasi ini sebelum dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar No. 188/358/HK/410.010.2/2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar. KPAD adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS secara holistik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Plt Walikota Blitar Santoso sebagai berikut:

"Dalam hal ini, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar, sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan AIDS di wilayahnya, harus terus beradaptasi dan berinovasi guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan program penanggulangan AIDS secara lebih efektif" (Faisal, 2019)

KPAD Kota Blitar, sebagai lembaga koordinatif, memiliki peran penting dalam menggerakkan upaya penanggulangan AIDS di wilayahnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa KPAD dituntut untuk terus berinovasi, introspeksi, dan meningkatkan kinerjanya guna memastikan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting bagi KPAD untuk secara aktif menyesuaikan strategi dan pendekatannya agar dapat menjawab tantangan yang terus berkembang terkait pencegahan, perawatan, dan pengurangan stigma terhadap HIV/AIDS di masyarakat Kota Blitar. Lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan komunitas lokal, termasuk kelompok yang terdampak langsung, seperti orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dalam menjalankan tugasnya, KPAD memiliki sejumlah fungsi utama, antara lain menyusun kebijakan dan strategi daerah yang sejalan dengan rencana aksi nasional, mengkoordinasikan berbagai

program lintas sektor, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya HIV/AIDS, pentingnya pencegahan, dan pengurangan stigma terhadap ODHA.

Desain Kelembagaan

Struktur kelembagaan berkaitan dengan aturan dan mekanisme dasar dalam kerja sama, yang mencakup prosedur kolaborasi yang sah, keterbukaan proses, keterlibatan berbagai pihak, serta batasan eksklusivitas dalam forum (Iswanto, 2024). Peraturan dasar dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam kebijakan tersebut menyatakan bahwa Kolaborasi Penanganan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) KPAD Kota Blitar, penyusunan rencana bersama, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan adanya pertemuan anggota KPAD dimana pembentukan ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme koordinasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan HIV/AIDS. Pembentukan KPAD ini didasarkan pada regulasi yang mengatur keberadaan lembaga tersebut sebagai badan koordinatif, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa KPAD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan terkait pencegahan, pengobatan, dan penanganan dampak sosial dari HIV/AIDS di tingkat daerah.

Kolaborasi dilakukan dengan adanya interaksi dan peranan masing-masing institusi. Selain itu terdapat pembentukan KPAD dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS. Pembentukan KPAD ini memiliki fungsi koordinatif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Dalam hal penanganan HIV/AIDS pada fasilitas layanan kesehatan dapat dilakukan di RSUD dan puskesmas. Terdapat 5 RSUD dan 1 puskesmas yang melayani masyarakat Kota Blitar dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dharma Setiawan, sebagai berikut:

“Ada enam fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Blitar menyediakan pengobatan bagi penderita HIV. Yaitu puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Pengobatan dilakukan menggunakan obat ARV (antiretroviral) yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah” (Att, 2024)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Blitar telah menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai untuk penanganan HIV/AIDS melalui kolaborasi antara berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Dengan adanya 5 RSUD dan 1 puskesmas sebagai fasilitas pelayanan, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pengobatan, termasuk obat antiretroviral (ARV) yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa layanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS tidak hanya tersedia tetapi juga terjangkau, sebagai bagian dari komitmen dalam menanggulangi HIV/AIDS secara holistik. Selain itu, fungsi koordinatif Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan peran setiap institusi yang terlibat, baik dalam aspek pengobatan, pencegahan, maupun edukasi masyarakat.

Tabel 1. Fasilitas Kesehatan yang melayani ODHA di Kota Blitar

No.	Jenis Faskes	Type
1.	RSUD Mardi Waluyo	RS Tipe B
2.	RS Islam Aminah Blitar	RS Tipe D
3.	RS Katolik Budi Rahayu	RS Tipe C
4.	RS Shuhada Haji	RS Tipe D
5.	RSIA Tanjungsari	RS Tipe C
6.	Puskesmas Kepanjenkidul	Puskesmas

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar (2024)

Leadership (Kepemimpinan)

Kepemimpinan berperan krusial dalam mengakomodasi, memperkuat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong keberhasilan kerja sama. Kepemimpinan yang kredibel harus bisa memutuskan kebijakan secara bijak, dapat meyakinkan semua *stakeholder*, dapat mengelola proses kolaborasi, dan dapat pula menyelesaikan konflik atas isu-isu yang ada. Dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan, dilakukan dengan melalui musyawarah atau pertemuan dengan *stakeholder* yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dharma Setiawan:

"Kita terus menjalin koordinasi dan kolaborasi kok dengan semua pihak. Mulai pencarian, penyuluhan, pengobatan dan semuanya. Harapannya diskriminasi pada penderita Aids hilang dan 2030 HIV-AIDS" (Pemerintah Kota Blitar, 2020).

Pernyataan di atas menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki peran krusial dalam mengakomodasi, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan guna memastikan keberhasilan kolaborasi. Pemimpin yang kredibel harus mampu mengambil keputusan secara bijaksana, meyakinkan semua pihak yang terlibat, mengelola proses kolaborasi, serta menyelesaikan konflik yang muncul terkait isu-isu yang ada. Dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, pendekatan musyawarah dengan para pemangku kepentingan menjadi strategi utama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dharma Setiawan, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam berbagai aspek, mulai dari pencarian kasus, edukasi, hingga pengobatan, dengan harapan menghapus diskriminasi terhadap penderita AIDS dan mencapai target eliminasi HIV/AIDS pada 2030.

Tabel 2. Pemetaan Program, Kegiatan Dan Sasaran Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Blitar

Program	Kegiatan	Sasaran
Promotif	a. Penyampaian informasi publik melalui media layanan sosial. b. Edukasi mengenai penggunaan alat pengaman dalam setiap aktivitas seksual yang berisiko menularkan penyakit. c. Penyuluhan kesehatan yang ditujukan bagi remaja dan dewasa. d. Pengembangan keterampilan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta penularan HIV bagi tenaga medis dan tenaga nonmedis yang telah mendapatkan pelatihan. e. Inisiatif lain dalam upaya promosi kesehatan.	Policy maker; Swasta; Organisasi masyarakat; dan masyarakat
Preventif	a. Meningkatkan kapasitas tenaga profesional dalam memberikan perawatan, dukungan, dan pengobatan. b. Mendukung komunitas pendamping bagi ODHA dan OHIDHA. c. Menyediakan obat antiretroviral serta pengobatan untuk infeksi oportunistik. d. Menyediakan fasilitas dan layanan pemeriksaan HIV-AIDS terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ, serta jaringan tubuh yang didonorkan. e. Menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan bagi individu yang terinfeksi HIV-AIDS. f. Melaksanakan surveilans terhadap IMS, HIV, serta perilaku berisiko terkait penularan HIV-AIDS. g. Mengembangkan sistem pencatatan serta pelaporan kasus HIV-AIDS. h. Menyediakan fasilitas serta perlengkapan pendukung lainnya.	Pemerintah pusat; Pemda; Swasta; dan Masyarakat
Kuratif	a. Penyediaan dan Peningkatan Akses Pengobatan b. Layanan Perawatan dan Dukungan Medis c. Pemantauan dan Evaluasi Kesehatan ODHA d. Dukungan Psikososial dan Pendampingan ODHA e. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV- AIDS; dan f. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.	ODHA
Rehabilitatif	a. Program rehabilitasi dalam penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk memulihkan kualitas hidup agar individu dapat kembali berperan secara sosial dan ekonomi. b. Rehabilitasi bagi kelompok pekerja seks, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja dan edukasi diri, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui sektor sosial. c. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika suntik, sebagaimana disebutkan dalam ayat terkait, dilakukan melalui layanan rawat jalan, rawat inap, serta program pemulihan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	ODHA

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar dirancang secara komprehensif dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Pendekatan promotif bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan seperti iklan layanan masyarakat, kampanye penggunaan kondom, promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda, serta pelatihan pencegahan penyalahgunaan Napza. Sasaran dari kegiatan ini mencakup pembuat kebijakan, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.

Pendekatan preventif difokuskan pada upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mendukung kelompok ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), menyediakan obat antiretroviral (ARV) dan layanan pemeriksaan darah, serta melakukan surveilans IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV. Sasaran dari program ini adalah pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan kuratif menitikberatkan pada pengobatan dan dukungan bagi ODHA, termasuk penyediaan ARV, layanan pemeriksaan dan pendampingan, pengembangan sistem pencatatan kasus, serta pengelolaan data secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk membantu ODHA memperoleh perawatan yang memadai dan akses pengobatan yang optimal.

Sementara itu, pendekatan rehabilitatif bertujuan memulihkan kualitas hidup ODHA agar dapat kembali produktif secara sosial dan ekonomi. Rehabilitasi dilakukan melalui pemberdayaan keterampilan kerja untuk populasi kunci seperti pekerja seks dan pengguna Napza suntik, dengan menyediakan program rawat jalan, rawat inap, dan pasca-rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar, yang tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pengobatan tetapi juga pemberdayaan dan pemulihan bagi populasi terdampak.

Proses Kolaborasi

Proses kolaboratif merupakan elemen penting dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Proses ini diawali dengan dialog tatap muka yang bertujuan membangun kepercayaan antar pihak. Dialog yang efektif dan berbasis saling pengertian akan membangun kepercayaan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk meningkatkan komitmen dalam kolaborasi. Komitmen yang kuat di antara para *stakeholders* memungkinkan terciptanya pemahaman bersama, termasuk perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan penetapan misi yang jelas. Setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi secara efektif.

Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak dari *multi-stakeholder*, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan. Dari sisi pemerintah, terdapat Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan Dinas Sosial yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Blitar. Dari sisi LSM, terdapat Blitar Care, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu HIV/AIDS di wilayah Blitar Raya. Sedangkan dari aspek organisasi kemasyarakatan, terdapat Kelompok Warga Peduli AIDS (WPA), yang berperan penting dalam memberikan pendampingan kepada warga yang terindikasi terinfeksi HIV/AIDS. Dengan sinergi yang kuat antar pihak, diharapkan kolaborasi ini mampu meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar.

a. *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Dialog tatap muka merupakan aktivitas yang melibatkan pertemuan rutin antar pemangku kepentingan guna mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai kerja sama dalam menjalankan tugas. Kegiatan yang dilakukan dalam proses dialog tatap muka dalam penanganan HIV/AIDS adalah melalui rapat kelompok kerja (pokja) antar pemangku kepentingan.



Gambar 2. Dokumentasi Rapat Koordinasi KPAD

Sumber: Pemerintah Kota Blitar (2020)

Gambar di atas menunjukkan terdapat rapat koordinasi (Rakor) dalam perencanaan Kelompok Kerja KPAD Kota Blitar. Rakor ini sebagai forum rutin yang diselenggarakan KPA dalam rangka dialog

tatap muka sebagai proses dalam pelaksanaan kolaborasi. Kolaborasi akan terbangun ketika terdapat interaksi satu dengan yang lain melalui forum.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Upaya menumbuhkan keyakinan bahwa setiap pihak memiliki tujuan yang sejalan dalam mencapai kesepakatan bersama dapat dimulai dengan menjalin komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program, kebijakan, atau proyek kolaboratif. Proses ini melibatkan dialog terbuka, transparansi informasi, serta saling mendengarkan untuk memahami kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran masing-masing pihak. Dengan demikian, *trust building* menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan efektif, yang pada akhirnya mendorong tercapainya hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Muchlis selaku Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut:

"Pertemuan ini bertujuan untuk menilai kinerja Komisi Penanggulangan AIDS dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang telah diidentifikasi. Kami terus membangun koordinasi dengan seluruh pihak, mencakup proses deteksi kasus, edukasi, hingga pengobatan. Harapannya, stigma dan diskriminasi terhadap penderita AIDS dapat dihilangkan" (Pemerintah Kota Blitar, 2020)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara berbagai pihak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Perlunya evaluasi kinerja Komisi Penanggulangan AIDS untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta menjalin kerja sama yang erat dalam aspek pencarian kasus, penyuluhan, pengobatan, hingga upaya penghapusan diskriminasi terhadap penderita AIDS. Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk membangun kepercayaan di antara *stakeholder* melalui koordinasi yang konsisten, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi ODHA.

Dalam membangun kepercayaan satu sama lain, forum sosialisasi atau konsolidasi antar pemerintah dan *stakeholder* lainnya sangat penting. Masalah HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan secara sektoral hanya melalui pendekatan kesehatan, tetapi memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk sektor pendidikan, sosial, hukum, dan ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam kolaborasi yang terstruktur dan berkesinambungan, upaya penanggulangan HIV/AIDS dapat lebih efektif dan menyeluruh, baik dalam aspek pencegahan, pengobatan, maupun penghapusan stigma terhadap ODHA (Pradipta et al., 2023). Koordinasi lintas sektor ini menjadi landasan strategis dalam menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

c. *Commitment to Process* (Komitmen untuk Proses)

Kesepakatan untuk menjalankan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan mencerminkan adanya keselarasan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Komitmen bersama ini menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki inisiatif dan tanggung jawab terhadap peran masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan kolaboratif. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran penuh terhadap tugas serta kewajibannya dalam mewujudkan tujuan bersama (Pane & Iskandar, 2023). Komitmen Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam penanggulangan HIV/AIDS tercermin melalui implementasi Program 3 Zero yang diluncurkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Blitar. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan HIV/AIDS secara komprehensif dengan menargetkan tiga hal utama: *pertama*, tidak ada infeksi baru HIV. Pemerintah berupaya menurunkan angka penularan HIV baru melalui edukasi masyarakat, penyuluhan tentang perilaku seksual aman, penyediaan kondom, dan akses layanan tes HIV yang lebih luas. *Kedua*, tidak ada kematian akibat AIDS. Untuk itu, pemerintah memastikan ketersediaan pengobatan antiretroviral (ARV) yang gratis bagi ODHA, serta meningkatkan kapasitas tenaga medis untuk memberikan layanan yang berkualitas. *Ketiga*, tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Pemerintah, bersama dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan, berupaya menghilangkan stigma sosial terhadap ODHA melalui kampanye kesadaran dan edukasi masyarakat. Program 3 Zero ini juga sejalan dengan target nasional untuk eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030. Melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas, Kota Blitar berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang sehat, bebas dari HIV/AIDS, dan lebih inklusif serta adil.

d. *Share Understanding* (Berbagi Pemahaman)

Saling berbagi pengertian dan pemahaman antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini, para *stakeholders* tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga pengalaman serta tantangan yang dihadapi, untuk kemudian mencari solusi bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Para *stakeholders* memiliki prinsip yang kuat dalam menjalankan tugas pokok masing-masing. Mereka saling menerima saran dan sering melakukan diskusi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Selain itu, sebelum menjalankan kegiatan, mereka juga melakukan survei dan uji coba sebagai upaya untuk memperbaiki pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS.

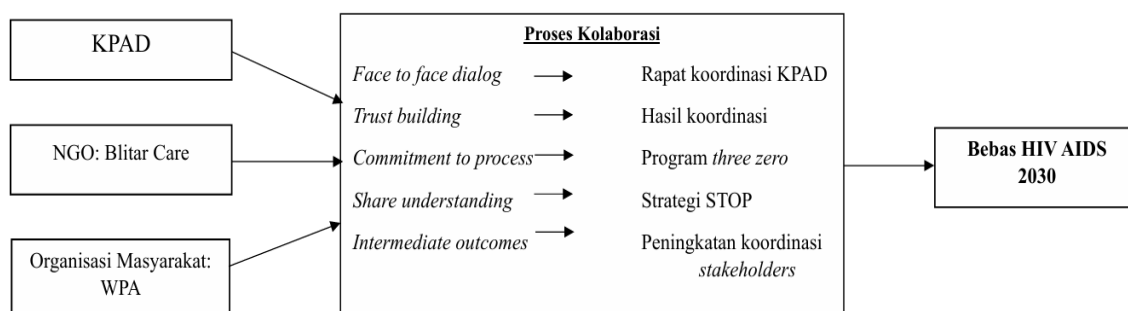
Salah satu contoh keberhasilan dari kolaborasi ini adalah penemuan kasus HIV yang tinggi, yang justru dianggap sebagai prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara *stakeholder* berhasil mengidentifikasi kasus HIV yang sebelumnya tersembunyi, sehingga penderita dapat segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan yang diperlukan (United Nations, 2021). Pernyataan ini sejalan dengan upaya bersama dalam meningkatkan deteksi dini dan memberikan perawatan yang tepat waktu. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber: "Penemuan kasus HIV yang banyak sebenarnya adalah sebuah prestasi karena berarti kita berhasil mengidentifikasi kasus tersembunyi. Dengan demikian, penderita bisa segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan" (Att, 2024).

Lebih lanjut, penurunan jumlah kasus baru HIV menunjukkan efektivitas dari strategi STOP (Suluh, Temukan, Obati, Pertahankan), yang diterapkan oleh para *stakeholders*. Dalam strategi ini, upaya untuk menemukan kasus HIV sedini mungkin sangat ditekankan, agar penderita bisa segera mendapatkan pengobatan yang diperlukan dan mencegah penularan lebih lanjut. "Penurunan jumlah kasus baru ini sejalan dengan strategi STOP, yaitu Suluh, Temukan, Obati, Pertahankan. Kami berupaya menemukan kasus sedini mungkin agar penderita bisa segera diobati dan mencegah penularan lebih lanjut" (Att, 2024). Kolaborasi ini menggambarkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berbagi pemahaman untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil sementara)

Hasil sementara dari kegiatan kolaborasi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar mencerminkan sejauh mana upaya bersama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan sektor lain dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata. Hasil sementara ini sangat penting untuk memastikan bahwa kolaborasi yang sedang berlangsung dapat terus berlanjut dan berkembang tanpa hambatan yang berarti, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan para penderita HIV/AIDS (Rahman et al., 2021). Beberapa hasil sementara yang tercapai dari kolaborasi ini antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan HIV/AIDS, semakin banyaknya orang yang melakukan tes HIV secara sukarela, serta peningkatan jumlah penderita HIV yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) secara tepat waktu. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai sektor juga menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS, yang merupakan bagian dari tujuan utama dalam program 3 Zero.

Hasil sementara ini juga mencakup peningkatan koordinasi antar *stakeholder* yang lebih baik, dengan adanya forum diskusi dan evaluasi rutin yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama. Hal ini memungkinkan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih lancar dan responsif terhadap tantangan yang muncul di lapangan. Dengan tercapainya hasil sementara yang positif ini, diharapkan kegiatan kolaborasi dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mencapai target eliminasi HIV pada tahun 2030.



Gambar 3. Proses Kolaborasi Penanganan HIV AIDS di Kota Blitar

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Secara garis besar proses kolaborasi penanganan HIV/AIDS di Kota Blitar dapat digambarkan seperti gambar diatas. Bagan ini menggambarkan upaya kolaboratif antara tiga pihak utama, yaitu KPAD, NGO Blitar Care, dan organisasi masyarakat WPA dalam rangka mencapai target Bebas HIV AIDS 2030. Kolaborasi ini dilakukan melalui serangkaian proses yang sistematis, dimulai dari *face to face dialog* yang diwujudkan dalam rapat koordinasi KPAD, diikuti dengan *trust building* yang menghasilkan kesepakatan atau hasil koordinasi. Selanjutnya, adanya *commitment to process* dituangkan dalam implementasi Program *Three Zero*, serta *share understanding* yang mendasari penerapan Strategi STOP. Tahapan-tahapan tersebut menghasilkan *intermediate outcomes* berupa peningkatan koordinasi antar *stakeholders*. Proses kolaborasi yang efektif ini memperkuat sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menangani isu HIV/AIDS secara terpadu. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercapai hasil akhir berupa masyarakat yang bebas dari HIV/AIDS pada tahun 2030, sesuai dengan target global dan nasional dalam penanggulangan epidemi tersebut.

KESIMPULAN

Tata kelola pemerintahan kolaboratif yang diterapkan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, meskipun hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, akademisi, serta NGO/LSM. Berdasarkan teori Ansell dan Gash, empat variabel utama yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif, memainkan peran penting dalam keberhasilan kolaborasi ini. Kondisi awal yang dimulai dengan deteksi HIV/AIDS pada tahun 2009 di Kota Blitar menunjukkan perlunya peran *stakeholder*, terutama Dinas Kesehatan sebagai sektor utama dalam penanganan. Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) memperkuat peran koordinatif dalam upaya ini, memfasilitasi kebijakan dan program yang efektif. Desain kelembagaan yang mengacu pada regulasi, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020, menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi kolaborasi berbagai pihak, termasuk pembentukan kelompok kerja dan program evaluasi. Kepemimpinan yang kredibel dari pihak pemerintah, yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sangat penting untuk memotivasi dan memastikan kesuksesan kolaborasi. Proses kolaborasi yang dijalankan melalui dialog terbuka dan membangun kepercayaan antara *stakeholder* juga menjadi kunci untuk menciptakan pemahaman bersama dan merumuskan rencana strategis yang efektif. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif memberikan solusi yang menyeluruh dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: *pertama*, penting untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar, untuk meningkatkan sumber daya dan efektivitas program. *Kedua*, penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat, khususnya KPAD, perlu dilakukan agar dapat menjalankan fungsi koordinatif dengan lebih baik. *Ketiga*, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan terkena dampak HIV/AIDS, melalui program edukasi dan pemberdayaan yang lebih intensif. *Keempat*, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan transparan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program penanggulangan HIV/AIDS. *Terakhir*, dukungan kebijakan yang lebih konsisten dari pemerintah daerah dan pusat akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perlu untuk membuat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Wali Kota khusus dalam penanganan HIV/AIDS sebagai bentuk komitmen regulatif yang konkret.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik Kota Blitar. (2024). *Kota Blitar dalam Angka 2024*. <https://blitarkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/5fc801c573844724ff03dd80/kota-blitar-dalam-angka-2024.html>
2. Dinas Kesehatan. (2023). *Profil Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023*. <https://dinkes.blitarkota.go.id/uploads/dokumen/Profil%20Kesehatan%20Kota%20Blitar%20Tahun%202023.pdf>
3. Faisal. (2019). *Cegah Penyakit HIV/AIDS, Ini yang Bakal Ditempuh Pemkot Blitar*. Klik Warta. <https://www.klikwarta.com/cegah-penyakit-hivaid-nya-ini-yang-bakal-ditempuh-pemkot-blitar>
4. Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 1–11.
5. Handayani, N., Risianti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67.
6. Iswanto, D. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan. *Praja Lamongan*, 7(2), 11–20.
7. Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192>
8. Muthmainnah. (2024). *Seri Penyakit Seksual Menular: HIV/AIDS*. CV Jejak (Jejak Publisher).
9. Nevendorff, L., Schroeder, S. E., Pedrana, A., Bourne, A., & Stooze, M. (2023). Prevalence of sexualized drug use and risk of HIV among sexually active MSM in East and South Asian countries: systematic review and meta-analysis. *Journal of the International AIDS Society*, 26(1), e26054.
10. Nilamsari, W. (2023). *Strategi Advokasi Penanggulangan Hiv/Aids Bagi Kelompok Waria Di Jakarta Timur (Studi Kasus Yayasan Srikandi Sejati)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
11. Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
12. Nurcahyaningih, C., Kasmini, O. W., & Rahayu, S. R. (2021). Performance Analysis Factors of Citizens Who Care about AIDS in Semarang City. *Public Health Perspective Journal*, 6(3).
13. Pane, D. I. M., & Iskandar, I. S. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dengan Penyakit Menular HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 7–19.
14. Pemerintah Kota Blitar. (2020). *Rapat Koordinasi Penanggulangan AIDS di Kota Blitar*. Pemerintah Kota Blitar. <https://blitarkota.go.id/berita/rapat-koordinasi-penanggulangan-aids-di-kota-blitar>
15. Pemerintah Kota Blitar. (2024). *RKPD Kota Blitar Tahun 2024*. <https://ppid.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2024/08/RKPD-Kabupaten-Blitar-Tahun-2024.pdf>
16. Pradipta, M. N., Helda, H., & Mulyana, A. (2023). Analisis Masalah Penyakit Menular Prioritas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(3), 464–472.
17. Rahman, F., Bahtiar, B., Permana, A. F., & Kurniawan, M. A. (2021). Factors Associated With Quality Of Life People Living With Hiv/Aids At Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Teman Sebaya (YPKDS) In Makassar City. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 670–678.
18. Salbila, I., & Usiono, U. (2023). Strategi Pencegahan HIV & AIDS: Langkah-Langkah Efektif Untuk Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5630–5639. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.19941>
19. Turi, J. S., & Fitriana, K. N. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(1), 18.

20. United Nations. (2021). *Global AIDS strategy 2021-2026: End inequalities. End AIDS*. UN: The United Nations.
21. Winarni, S., Martiningsih, W., & Fitriah, A. H. (2023). Pendidikan dan Pelatihan Penentuan Pola Makan Sehat Tinggi Antioksidan pada Kader HIV/AIDS. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 4(2), 139–146.



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Spatial Concentration of Micro and Small Industries (MSIs) in Blitar Regency

Lu'lu'il Munawaroh ¹, Mohammad Mansyur ²

Independent Researcher¹
 Blitar Regency Land Office, Blitar, Indonesia ²
lulilmunawaroh25@gmail.com

Abstract

Micro and Small Industries (MSIs) support economic growth, create jobs, and increase regional income. Blitar Regency, as part of the Development Area Units Seven in East Java, has excellent potential to develop the MSIs sector. However, the growth of this sector is still low, and its distribution is not proportional, resulting in economic disparities between regions. This study aims to analyze the level of spatial concentration of MSIs in Blitar Regency using the Concentration-Deconcentration Index, Distribution Quotient (DQ), and location association analysis (L) methods. The analysis results show that the concentration index has decreased from 29.49 in 2018 to 25.02 in 2023, with a deconcentration value of 4.47, indicating a tendency for a proportional distribution of MSIs. In addition, the location association value between the area and the number of MSIs increased from 70.51 to 74.98, indicating an increasingly strong spatial relationship. The Blitar Regency Government plays a role in encouraging equality through training programs, mentoring, business legality assistance, and the use of digital technology and geographic information systems. The MSIs sector, based on food, beverages, wood industry, and tourism, also significantly contributes to regional economic growth. With various strategic policies based on the needs of business actors, the equality and growth of MSIs in Blitar Regency can continue to be strengthened to support sustainable economic development.

Keywords: Micro and Small Industries; spatial concentration; industrial distribution; Blitar Regency

INTRODUCTION

Micro and Small Industries (MSIs) drive economic recovery and foster growth across regions (Zalva et al., 2023; Wahyudi et al., 2021). In Indonesia, this sector significantly contributes to labor absorption (Shaffa & Abdullah, 2023; Rusminingsih et al., 2022), enhances regional income through productive economic activities and increased tax revenues (Ramadhan et al., 2017; Anggraini et al., 2020; Rusminingsih et al., 2022) and supports poverty alleviation efforts (Arifin & Amri, 2024; Wu et al., 2021). As of 2019, Indonesia recorded approximately 65.5 million MSIs units, employing around 119.6 million workers (Setiawan, 2023).

INFORMASI ARTIKEL

Naskah diterima: 04/02/2025
 Revisi: 11/04/2025
 Diterima untuk dipublikasi: 16/04/2025

doi: -

© 2025 Jurnal Pradah

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40,
 Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117
 Telepon: (0342) 808165
 Fax: (0342) 806275
 E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

Furthermore, the MSIs sector accounts for approximately 22% of the country's Gross Domestic Product (GDP) (Novia, 2023).

Geographically, industrialization is an inherently selective process, as rapid industrial growth and structural economic transformation rarely occur uniformly across a country. Such uneven development often leads to spatial concentration, characterized by clustering industries and economic activities within specific regions. When an industrial distribution is imbalanced, and a particular area disproportionately dominates industrial activity, it indicates the presence of spatial concentration in that region (Aiginger & Rossi-Hansberg, 2006). The uneven development of the MSIs sector across regions frequently contributes to widening interregional economic disparities (Wen et al., 2024). Addressing this inequality requires implementing sustainable development strategies supported by inclusive and regionally sensitive policy frameworks.

Blitar Regency is one of the Seven Development Area Units in East Java and possesses substantial potential for developing the MSIs sector. This potential is supported by its status as the largest regency among the Seven Development Area Units and the availability of local resources that facilitate economic activities. However, the growth of the MSIs sector in Blitar Regency remains relatively low and uneven, leading to disparities in economic development (Khuzaini & Suwitho, 2018). The spatial concentration of MSIs in Blitar Regency is unbalanced, contributing to the unequal geographic distribution of industrial activities. This inequality risks exacerbating regional economic gaps, where areas with high MSIs concentration tend to experience accelerated economic growth, while deconcentrated areas face development delays and heightened poverty risks (Wu et al., 2021).

Accordingly, it is essential to conduct an analysis that identifies the level of spatial concentration of the MSIs sector in the Blitar Regency. Such analysis is crucial for understanding industrial development patterns and formulating policy recommendations that promote more equitable growth within the MSIs sector. Therefore, this study aims to calculate the MSIs concentration index in Blitar Regency to provide a comprehensive overview of industrial distribution and its implications for regional development.

METHODS

This study is conducted within the administrative boundaries of Blitar Regency, East Java, Indonesia. Kediri Regency borders the regency to the north, Malang Regency to the east, the Indian Ocean to the south, and Tulungagung Regency to the west. Additionally, Blitar City is located in the central part of the regency and is administratively separate from the surrounding Blitar Regency. Geographically, Blitar Regency lies between 111°40'–112°10' East Longitude and 7°58'–8°09'51" South Latitude, encompassing an area of approximately 1,588.79 km² (158,879 hectares). Administratively, it consists of 22 sub-districts, including Wonodadi, Udanawu, Srengat, Bakung, Sutojayan, Kanigoro, Ponggok, Sanankulon, Selopuro, Kesamben, Binangun, Kademangan, Talun, Panggungrejo, Garum, Wlingi, Selorejo, Nglegok, Doko, Gandusari, Wonotirto, and Wates. The largest sub-district is Wonotirto, covering an area of 164.54 km², while the smallest is Sanankulon, with an area of 33.33 km².

This study employs a quantitative descriptive approach to statistically represent the observed phenomena. While this approach has limitations in terms of generalizability, it enables measurable analysis and supports data-driven decision-making (Hernandez-Flórez et al., 2022; Mirete et al., 2020; Prasetya et al., 2020; Putra et al., 2023). Data were collected using a documentation technique, relying on secondary sources from Statistics Indonesia. The data set includes the land area of each sub-district and time series data on the number of MSIs by raw material type for the years 2018 and 2023. The classification of MSIs by raw material type was selected to capture the dynamics of industrial sector growth in Blitar Regency and to analyze the utilization of local resources in production activities.

This study employs the primary spatial analysis methods of the Concentration–Deconcentration Index, Distribution Quotient (DQ), and Location Association Index (L). These techniques identify and interpret the spatial distribution patterns of MSIs across sub-districts within the Blitar Regency. Comparing interregional distributions enhances the understanding of spatial patterns in the MSIs sector. As with other spatial analysis methods, the results of these indices serve as a foundation for designing more effective and spatially targeted regional development policies (Muta'ali, 2015).

The Concentration Index (C) ranges from 0 to 100, with a higher value indicating greater spatial concentration. The formula for calculating the Concentration Index is presented in the following equation.

$$C = \frac{\sum(X_i - Y_i)}{2} \dots\dots\dots (1)$$

Description:

X_i : The percentage of the total area represented by sub-region i within the study region.

Y_i : The percentage of total activities or observed characteristics (e.g., number of MSIs) located in sub-region i .

The Distribution Quotient (DQ) is a spatial analytical tool used to measure the level of centralization of a specific sector or economic activity in a given region relative to a broader reference area. A higher DQ value indicates a greater concentration of activity in the region. The formula for calculating the DQ is presented in the following equation.

$$DQ = (Y_i/X_i) \dots\dots\dots (2)$$

Description:

X_i : The percentage of the total area represented by sub-region i within the study region.

Y_i : The percentage of total activities or observed characteristics (e.g., number of MSIs) located in sub-region i .

The Distribution Quotient (DQ) can be classified into three categories based on its value. A DQ value of less than 1 ($DQ < 1$) indicates deconcentration or under-representation, meaning that the proportion of a sector or economic activity in a specific region is lower than that in the broader reference region. This suggests that the sector is less developed locally or contributes less to the regional economy. A DQ value equal to 1 ($DQ = 1$) indicates proportional distribution, implying that the sector's share in the region is equivalent to its share in the reference region, with no indication of concentration or deconcentration. Meanwhile, a DQ value greater than 1 ($DQ > 1$) signifies concentration or over-representation, indicating that the sector holds a larger share than the reference region. This suggests that the sector is relatively more advanced and dominant or potentially serves as a key driver of regional economic activity.

Deconcentration (D) is calculated by subtracting the concentration index value in the second period (C_2) from that of the initial period (C_1). The resulting value ranges from -100 to 100. A negative D value indicates increased industrial concentration, suggesting higher spatial clustering over time. In contrast, a positive D value indicates a deconcentration process whereby industrial activities become more spatially dispersed, indicating a shift toward a more balanced regional distribution.

$$D = C_2 - C_1 \dots\dots\dots (3)$$

Location Association (L) refers to the level of spatial association between two activities or between specific social and economic characteristics within a region. The L value ranges from 0 to 100, with higher values indicating a stronger spatial association. The formula used to calculate the location association index is presented in the following equation.

$$L = 100 - \frac{\sum(X_i - Y_i)}{2} \dots\dots\dots (4)$$

Description:

X_i : The percentage of the total area represented by sub-region i within the study region.

Y_i : The percentage of total activities or observed characteristics (e.g., number of MSIs) located in sub-region i .

RESULTS AND DISCUSSION

Based on the concentration analysis using the Distribution Quotient (DQ) method in 2018, of the 22 sub-districts in Blitar Regency, the majority (59.09% or 13 sub-districts) fell into the category of proportional distribution. The sub-districts experiencing deconcentration reached 22.73% or (5 sub-districts), namely Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Doko, and Wonodadi. Meanwhile, 18.18% (4 sub-districts) showed signs of industrial concentration, including Kanigoro, Nglegok, Sanankulon, and Ponggok. By 2023, the proportion of sub-districts with a proportional distribution of MSIs increased to 77.27% (17 sub-districts). The number of sub-districts experiencing deconcentration declined to 9.09% (2 sub-districts), specifically Wonotirto and Panggungrejo. Similarly, those categorized as concentrated decreased to 13.64% (3 sub-districts), namely Nglegok, Sanankulon, and Ponggok. These shifts indicate a general improvement in the spatial distribution of MSIs across sub-districts between 2018 and 2023. For instance, Binangun, Doko, and Wonodadi—previously categorized as deconcentrated in 2018—will transition to the proportional distribution category by 2023. Additionally, Kanigoro, initially classified as concentrated, also shifted to the proportional distribution category in 2023.

Tabel 1: Distribution Quotient (DQ) Values by Sub-District in Blitar Regency: 2018 and 2023

No	Sub-District	Total Area (Xi)		Number of MSIs (Yi)				DQ	
				2018		2023		2018	2023
		Km ²	(%)	Units	(%)	Units	(%)		
1	Bakung	111,24	7,00	1204	6,09	1285	4,96	1	1
2	Wonotirto	164,54	10,36	305	1,54	457	1,76	0	0
3	Panggungrejo	119,04	7,49	184	0,93	420	1,62	0	0
4	Wates	68,76	4,33	617	3,12	810	3,13	1	1
5	Binangun	76,79	4,83	332	1,68	674	2,60	0	1
6	Sutojayan	44,2	2,78	445	2,25	835	3,22	1	1
7	Kademangan	105,28	6,63	848	4,29	1264	4,88	1	1
8	Kanigoro	55,55	3,50	1058	5,35	1335	5,15	2	1
9	Talun	49,78	3,13	851	4,30	1049	4,05	1	1
10	Selopuro	39,29	2,47	526	2,66	787	3,04	1	1
11	Kesamben	56,96	3,59	422	2,13	805	3,11	1	1
12	Selorejo	52,23	3,29	880	4,45	1150	4,44	1	1
13	Doko	70,95	4,47	402	2,03	653	2,52	0	1
14	Wlingi	66,36	4,18	816	4,13	1028	3,97	1	1
15	Gandusari	88,23	5,55	1055	5,34	1487	5,74	1	1
16	Garum	54,56	3,43	948	4,79	1285	4,96	1	1
17	Nglegok	92,56	5,83	3275	16,56	3443	13,29	3	2
18	Sanankulon	33,33	2,10	1489	7,53	1837	7,09	4	3
19	Ponggok	103,83	6,54	2695	13,63	3046	11,76	2	2
20	Srengat	53,98	3,40	769	3,89	1112	4,29	1	1
21	Wonodadi	40,35	2,54	250	1,26	478	1,84	0	1
22	Udanawu	40,98	2,58	401	2,03	672	2,59	1	1
C1 Blitar of Regency Index									25,02
C2 Blitar of Regency Index									29,49
DQ of Blitar Regency									1
Deconcentration Value (C2-C1)									4,47
Location Assosiation Value (L)									70,51 74,98

Description:  : Deconcentration  : Propotional  : Concentration

In 2018, the industrial concentration index in Blitar Regency was 29.49, categorized as Low Concentration. This indicates that the distribution of MSIs in Blitar Regency was relatively proportional, with no significant dominance by specific areas. By 2023, the concentration index had decreased to 25.02, still within the Low Concentration category. Therefore, the deconcentration value (D) is 4.47, indicating a growing tendency toward spatial equality in the distribution of MSIs across Blitar Regency.

This equalization is driven by an increase in the number of MSIs, from 19,772 industry units in 2018 to 25,912 industry units in 2023, representing a growth rate of 31.05%. Several sub-districts recorded significant growth in the number of MSIs, notably Panggungrejo and Binangun Sub-districts, each of which experienced growth exceeding 100%. In Panggungrejo Sub-district, the number of MSIs increased from 184 industry units in 2018 to 420 industry units in 2023, corresponding to a growth rate of 128.26%. Despite this rapid

expansion, the sub-district remains within the deconcentration category due to its extensive land area—119.04 km²—making it the second largest sub-district in Blitar Regency.

The growth of MSIs in Panggungrejo District is closely linked to the active participation of local youth and the supportive role of the Village Government. In particular, Serang Village youth have been actively harnessing local potential, especially within the tourism sector. This engagement is evidenced by Serang Village's nomination among the top 50 tourist destinations in the 2021 Indonesian Tourism Village Award (Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI), a program initiated by the Ministry of Tourism and Creative Economy held from May to December 2021. Additionally, Serang Village was awarded first place in the "Best Toilet" category. The Village Government of Serang contributes significantly by strengthening local institutions and organizations, such as Working Groups, Tourism Awareness Groups, youth organizations, and Village-Owned Enterprises. These institutions serve as key instruments for independently managing village resources, enabling the local community to optimize existing assets for sustainable development (Alfiani et al., 2024).

As a designated tourist village, developing the tourism sector in Serang Village necessitates support from various complementary sectors, particularly the MSIs sector. The optimization of natural resource management through industrial development can be integrated with the creative economy, ultimately enhancing the attractiveness and competitiveness of local tourist destinations. This linkage is evidenced by the growth of MSIs, particularly in the tourism accommodation and food and beverage sectors within the Panggungrejo District. Between 2018 and 2023, the number of food and beverage industry units increased from 60 to 139, representing a growth rate of 131.67%. This significant development highlights the role of a strengthened tourism ecosystem as a key driver for the expansion of MSIs in Panggungrejo District.

In Binangun District, the number of MSIs has increased significantly from 332 industry units in 2018 to 674 industry units in 2023, with a growth rate of 103.01%. In contrast to Panggungrejo District, industrial distribution in Binangun District has shifted from deconcentration in 2018 to a more proportional distribution in 2023. The MSIs sector engaged in food and beverages recorded a growth spike of 358.97%, with industry units increasing from 39 industry units in 2018 to 179 industry units in 2023. This growth is in line with the increase in plantation production, which reached 81.88%, from 83.17 thousand tons in 2018 to 151.27 thousand tons in 2023. One of the superior products from Binangun District, an icon of Blitar Regency, is the Golden Sugar Lollipop Candy, which is not only known locally but also in demand by people from outside the region (Susanto, 2023).

The results of the location association analysis show that the location association value between total area and the number of MSIs increased from 70.51 in 2018 to 74.98 in 2023. This indicates a strengthening spatial association, where areas with larger geographic coverage tend to exhibit a higher concentration of MSIs. In the context of Blitar Regency, this trend suggests that spatial factors, such as land area and location accessibility, play an increasingly important role in the development and distribution of MSIs.

The growth of MSIs, which contribute to the spatial distribution of MSIs in Blitar Regency, is also closely linked to the government's proactive role in promoting industrial development. The Blitar Regency Government through the Office of Cooperatives and Micro Enterprises, has implemented various training and capacity-building programs that have positively impacted the advancement of local MSIs. These programs assist industry actors in managing human resources and enhancing their entrepreneurial competencies (Setiawan, 2023). Furthermore, institutional support is provided through legal assistance and business formalization. For instance, taro chip producers have benefited from such initiatives to increase productivity and strengthen consumer trust in locally produced goods (Hervina Puspitosari et al., 2021).

To enhance transparency and improve the effectiveness of monitoring the distribution of local MSIs sectors, the Blitar Regency Government has developed a web-based Geographic Information System (GIS). This technological innovation enables more accurate spatial mapping of local MSIs distribution, facilitates location-based monitoring and evaluation, and supports compliance with relevant regulatory frameworks (Fadhila, 2017). Moreover, integrating digital technologies and social media platforms has become a critical factor in promoting and marketing traditional products. Items such as brown sugar have been successfully positioned to compete with modern commercial goods through enhanced digital visibility and outreach strategies (Boedirochminarni, 2018).

The MSIs sector in Blitar Regency—particularly the food and beverage sub-sector, which accounts for 19.6% of total industries, and the wood-based industry, contributing 20.1%—plays a significant role in

enhancing per capita income and driving regional economic development (Hasanah et al., 2023). Furthermore, the development of the MSIs sector in conjunction with the tourism industry increasingly underscores the urgency of improving human resource quality and implementing sustainable marketing strategies to enhance the competitiveness of local tourist destinations (Hermawati et al., 2020). Taken together, these initiatives highlight the importance of adopting a holistic and demand-driven policy framework that is responsive to the actual needs of industry actors, thereby reinforcing the long-term sustainability of MSIs growth in Blitar Regency.

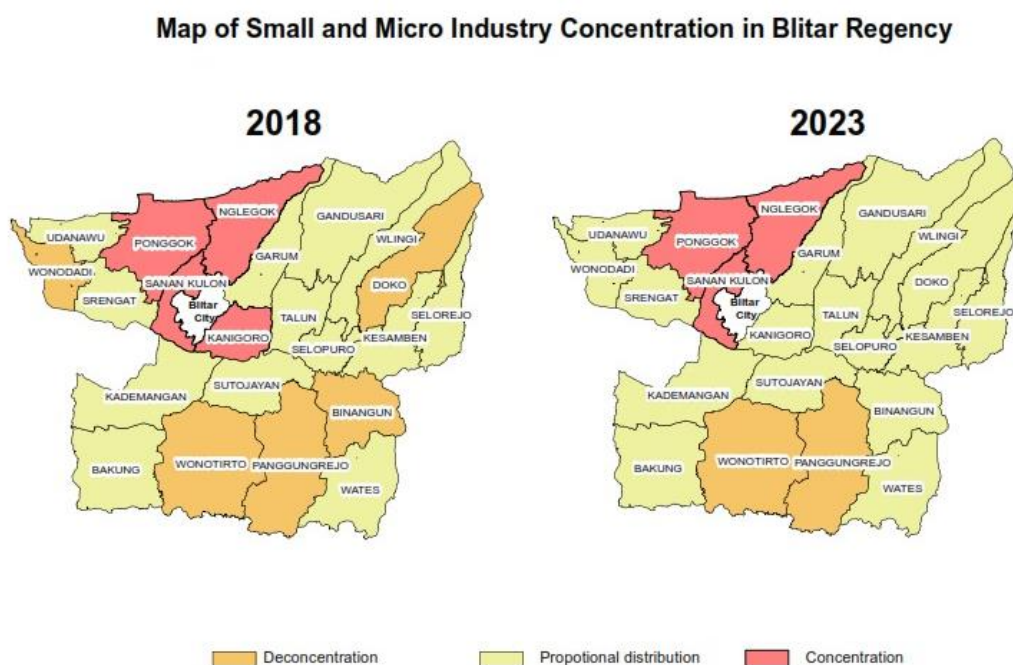


Figure 1: Map of MSIs Concentration in Blitar Regency 2018 and 2023

Areas located in proximity to the city center (Blitar City) tend to exhibit industrial concentration, while peripheral regions display a more proportionally distributed or even deconcentrated industrial pattern. This spatial phenomenon offers valuable insights for local governments in formulating strategic policies promoting equitable industrial development to support more inclusive economic growth across Blitar Regency. Between 2018 and 2023, there was a notable trend toward a more balanced distribution of MSIs, as evidenced by the decline in high-concentration zones such as Kanigoro District and the increase in proportionally distributed areas, including Doko and Binangun Districts. Binangun District, in particular, markedly transitioned from a previously deconcentrated pattern to a more proportionally distributed one, primarily driven by the expansion of the plantation-based industrial sector in the area. Conversely, coastal and hilly regions such as Wonotirto and Panggungrejo continue demonstrating relatively stagnant growth in the MSIs sector. A targeted and place-based development strategy is required to stimulate local economic activity and ensure more balanced regional industrial growth in these underdeveloped areas.

CONCLUSION

Between 2018 and 2023, there was a notable shift in the spatial concentration of Micro and Small Industries (MSIs) in Blitar Regency, marked by a trend toward more proportional distribution across several sub-districts. The decline in the concentration index from 29.49 in 2018 to 25.02 in 2023, accompanied by a deconcentration value of 4.47, indicates a movement toward a more balanced industrial landscape. Additionally, the increase in the location association value from 70.51 to 74.98 indicates a strengthening spatial correlation between total land area and the number of MSIs, where larger areas tend to host more industries. Expanding the number of MSIs in areas experiencing deconcentration is essential for achieving equitable economic development. A more balanced industrial distribution can help mitigate regional economic disparities, foster local economic growth, and promote a more sustainable and equitable urbanization process. The Blitar Regency Government is critical in supporting the development and equitable

distribution of MSIs through training programs, business mentoring, legal assistance, and integrating digital technology and geographic information systems for business mapping. Food, beverage, and wood-based industries contribute to per capita income growth and regional economic advancement. At the same time, tourism-oriented MSIs also demonstrate strong potential in enhancing regional competitiveness. With policy strategies tailored to the needs of business actors, the growth and spatial distribution of MSIs in Blitar Regency can be further strengthened to support sustainable and inclusive economic development.

REFERENCES

1. Aiginger, K., & Rossi-Hansberg, E. (2006). Specialization and concentration: A note on theory and evidence. *Empirica*, 33(4), 255–266. <https://doi.org/10.1007/s10663-006-9023-y>
2. Alfiani, D. A., Said, M. M., & Kurniati, R. R. (2024). *Analisis Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Destinasi Wisata (Studi kasus di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)*. 9(3), 655–663.
3. Anggraini, M. F., Munawaroh, L., & Sanjaya, R. S. (2020). Analisis Sektor Potensial Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Semarang Tahun 2019. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.55606/sinov.v3i1.70>
4. Arifin, M., & Amri, K. (2024). Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mikro Kecil Dan Penurunan Tingkat Kemiskinan: Bukti Data Panel Di Provinsi Riau. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(2), 125–132. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.420>
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2019). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2019). *Kecamatan Binangun Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2024). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar
8. Boedirochminarni, A. (2018). the Development Model of Brown Sugar Micro Small Medium Enterprise in Sumberringin Village Sanan Kulon Sub-District Blitar Regency. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 133. <https://doi.org/10.22219/jep.v16i2.9071>
9. Fadhila, A. (2017). *Pembuatan Sistem Informasi Geografis (Sig) Berbasis Web Untuk Pemetaan Persebaran Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Blitar*. https://repository.its.ac.id/42625/1/3513100030-Undergraduate_Theses.pdf
10. Hasanah, Q., Pratiwi, I. Y. R., Amalia, Z., & Wakidah, R. N. (2023). Analysis distribution and segmentation of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Kediri Residency Area: implications for local economic development. *MATRIX : Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 13(3), 130–141. <https://doi.org/10.31940/matrix.v13i3.130-141>
11. Hermawati, A., Nurwati, N., Suhana, S., Machmuddah, Z., & Ali, S. (2020). Satisfaction, hr, and open innovation in tourism sector. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 1–26. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040182>
12. Hernandez-Flórez, N., Arguello Rueda, J. D., Lhoeste-Charris, A., Martinez Gomez, I., Ortiz González, A. L., Orozco Santander, M. J., & González Martelo, V. E. (2022). Human rights in women victims of sexual violence in the armed conflict: A systematic review. In *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* (Vol. 6, Issue 6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3729
13. Hervina Puspitosari, Lilik Suprianti, & Alfian Chandra Ayuswantana. (2021). Legal Assistance For Micro, Small And Medium Enterprises Of Taro Chips In Tambakan Village, Blitar Regency, East Java Indonesia. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 201–207. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.32>

14. Khuzaini, K., & Suwitho, S. (2018). Analisis Swot Daya Dukung Daerah Terhadap Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Blitar. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 11(2), 193–218. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2007.v11.i2.315>
15. Mirete, A. B., Maquilón, J. J., Mirete, L., & Rodríguez, R. A. (2020). Digital competence and university teachers' conceptions about teaching. A structural causal model. *Sustainability (Switzerland)*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/SU12124842>
16. Muta'ali, Lutfhi. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang Dan Lingkungan*. BPFG Universitas Gadjah Mada
17. Novia, S. (2023). *Analisis Determinan Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Menengah Besar Indonesia : Studi Kasus Pulau Jawa 2008-2018*. 12(1), 21–32.
18. Prasetya, B., Hidayah, U., & Adawiyah, R. (2020). Religious Fundamentalism Among Students : Deskriptive Study on Rohis Activist Students in Probolinggo City. *CONCIENCIA: Journal of Islamic Education*, 20(2), 17–47. <https://doi.org/10.7560/712737-004>
19. Putra, S. P., Syaifullah, R., Nuryadin, I., & Riyadi, S. (2023). The Relationship between Participant Self-Evaluation, Coach Competence, Participant Tasks Achievement and Participant Potential after Underwriting Boccia Training Program. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(09), 4406–4414. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i9-58>
20. Ramadhan, D., Munawaroh, L., & Pranata, K. A. (2017). *Growth and Diversity Inter-Regional Economic Development In D.I. Yogyakarta Province (2014-2015)*.
21. Rusminingsih, D., Amaliah hidayanti, F., & Dwi Gusti Fajar Yanto, D. (2022). The Role of Wongsorejo Integrated Industrial Estate Agglomeration in Banyuwangi Community Welfare Method of Content Analysis. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 5(1), 76–82. <https://doi.org/10.54204/taji/vol5i2022012>
22. Setiawan, F. B. (2023). Pengaruh Program Pelatihan Ketrampilan dan Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(2), 560–576. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i2.755>
23. Shaffa, S. Z., & Abdullah, M. N. A. (2023). Analysis of Factors Influencing Labor Force Absorption in the Industrial Sector in West Java. *Journal of Social and Humanities*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.59535/jsh.v1i1.7>
24. Susanto, A. H. (2023, Mei 1). Legit dan Enak, Permen Lolipop Gula Emas Khas Blitar Jadi Favorit Warga Luar Daerah. Diakses dari https://timesindonesia.co.id/kuliner/453112/legit-dan-enak-permen-lolipop-gula-emas-khas-blitar-jadi-favorit-warga-luar-daerah#google_vignette
25. Wahyudi, S. T., Sari, K., & Nabella, R. S. (2021). Accelerating economic recovery post-covid19 through strengthening priority sectors in asean+6 countries: A generalized method of moment (gmm) approach. *Estudios de Economía Aplicada*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6005>
26. Wen, C., Xiao, Y., & Hu, B. (2024). Digital financial inclusion, industrial structure and urban–Rural income disparity: Evidence from Zhejiang Province, China. *PLoS ONE*, 19(6 June), 1–24. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303666>
27. Wu, J., Liu, X., Ruan, J., Qi, X., Wang, C., & Fan, D. (2021). Space power in inclusive development: Industrial clusters and rural anti-poverty. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph182010943>
28. Zalva, R., -, A., Salsabilla, S., Saputra, A. D., Yanuardi, R., & Maharani, A. (2023). the Role of the Manufacturing on the Indonesian Economy. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(1), 157–166. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.322>



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Peluang Blitar Raya sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Baru di Wilayah Bagian Selatan Provinsi Jawa Timur

Kevie Desderius ¹, Calvin Napoleon Bonaparte Lema Magana ²

Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Indonesia¹

Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang, Kota Malang, Indonesia ²

kevie.desderius-2023@pasca.unair.ac.id

Abstract

The rapidly advancing and dynamic world drives the need for qualified human resources, which are formed through education and training. This study aims to analyze the potential and challenges in developing Blitar Raya as a new higher education center in the southern region of East Java Province. Through a phenomenological study method based on observation and literature review, this research identifies various factors that support the development of higher education in Blitar Raya, including educational accessibility, increasing student enrollment, and the potential of local leading sectors such as tourism and local commodities. Additionally, this study explores the limitations of existing higher education services, including campus quality and curriculum relevance to industry needs. The findings indicate that despite challenges such as limited infrastructure and competition with other regions, support from stakeholders and government initiatives in developing transportation infrastructure, such as the Southern Cross Road (Jaringan Jalan Lintas Selatan), can strengthen Blitar Raya's position as a higher education center. By leveraging existing potential and addressing encountered issues, Blitar Raya has significant opportunities to evolve into a quality and competitive higher education hub. This research is expected to provide insights for the development of higher education in Blitar Raya for the advancement of the local community.

Keywords: Blitar Raya, Higher Education, Potential, Challenges, Regional Development

Abstrak

Perkembangan dunia yang semakin maju dan dinamis mendorong kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, yang terbentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan dalam pengembangan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi baru di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur. Melalui metode studi fenomenologi yang didasarkan pada observasi dan kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Blitar Raya, termasuk aksesibilitas pendidikan, peningkatan jumlah mahasiswa, serta potensi sektor unggulan lokal seperti pariwisata dan komoditas lokal. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi keterbatasan layanan pendidikan tinggi yang ada, termasuk kualitas kampus dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang terbatas dan persaingan dengan wilayah lain, dukungan dari pemangku kepentingan dan inisiatif pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur transportasi, seperti Jalan Lintas Selatan, dapat memperkuat posisi Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi masalah yang dihadapi, Blitar Raya memiliki peluang yang signifikan untuk berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkualitas dan kompetitif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk pengembangan pendidikan tinggi di Blitar Raya untuk kemajuan masyarakat lokal.

INFORMASI ARTIKEL Naskah diterima: 11/02/2025 Revisi: 26/03/2025 Diterima untuk publikasi: 16/04/2025 doi: - © 2025 Jurnal Pradah	JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia	Alamat: Jalan Semeru No. 40, Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117 Telepon: (0342) 808165 Fax: (0342) 806275 E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id
---	--	--

potensi sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan komoditas lokal. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi keterbatasan layanan pendidikan tinggi yang ada, termasuk kualitas kampus dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam hal keterbatasan infrastruktur dan persaingan dengan daerah lain, dukungan dari pemangku kepentingan serta inisiatif pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi, seperti Jaringan Jalan Lintas Selatan, dapat memperkuat posisi Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, Blitar Raya memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pendidikan tinggi di Blitar Raya demi kemajuan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Blitar Raya, Pendidikan Tinggi, Potensi, Tantangan, Pengembangan Wilayah

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pada era saat ini mendorong perlunya sumber daya manusia yang berkualitas dengan wawasan dan pengalaman sesuai kompetensi pekerjaan. Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya adanya perguruan tinggi untuk menjadi tempat belajar dan menambah wawasan serta pengalaman (Ramadhan dan Amalia, 2023). Generasi muda berkualitas lulusan perguruan tinggi menjadi sebuah tuntutan dengan berkembangnya Era Society 5.0 yaitu perkembangan era baru dengan teknologi yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan kehidupan (Christi dan Petrus, 2023). Melalui akses pendidikan, maka diharapkan para mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pembentukan karakter untuk dapat bersaing dan berkembang sesuai era saat ini (Septaria et.al, 2024).

Pendidikan tinggi memiliki peran dalam memperluas kesempatan kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Istiyani et.al (2022) tingkat pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Provinsi memiliki korelasi terhadap kesempatan kerja. Kenaikan angka lama sekolah atau kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi berdampak pada peningkatan kesempatan kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Ananta et.al (2024) menjelaskan bahwa aktivitas pendidikan dalam hal ini manfaat dari biaya pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan berkorelasi positif dengan kesehatan dan stabilitas ekonomi keluarga.

Kondisi perkembangan pada saat ini, mendorong perlu adanya perguruan tinggi yang bukan hanya membentuk dan menghasilkan lulusan berkualitas secara akademik, tetapi harus memberikan hasil berupa tata kelola dan citra *brand* yang baik dan berbeda dengan perguruan tinggi yang lainnya (Harahap et.al, 2020). Perkembangan perguruan tinggi sebagai sebuah prospek dunia usaha baru potensial menjadikan beragamnya pilihan sehingga persepsi calon mahasiswa perlu diperhatikan. Berbagai faktor yang membentuk persepsi mahasiswa antara lain yaitu faktor kualitas kampus, lokasi strategis kampus, upaya promosi kampus, kelengkapan sarana dan prasarana kampus (Permana dan Kamela, 2023).

Blitar Raya sebagai sebuah kawasan di bagian selatan Provinsi Jawa Timur menjadi potensial sebagai sebuah kawasan baru untuk pusat pendidikan tinggi. Pada wilayah ini memiliki beberapa kampus yang sudah berdiri baik berupa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta serta rencana pembangunan beberapa kampus baru. Wilayah Kota Blitar memiliki beberapa kampus negeri yaitu Kampus 3 Universitas Negeri Malang, Kampus Blitar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang, dan Akademi Komunitas Negeri Blitar (Kusumo, 2018; Poltekkes Kemenkes Malang, 2024; AKB, 2024). Selain itu Kota Blitar memiliki beberapa kampus swasta antara lain Universitas Islam Balitar, Universitas Nadhatul Ulama Blitar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, dan Kampus Blitar Universitas PGRI Adibuana Surabaya (UNISBA Balitar, 2024; Humas STIEKEN, 2020). Wilayah Kabupaten Blitar memiliki beberapa kampus yaitu STIT Al-Muslihuun Tlogo Kanigoro, dan STITMA Blitar (Ansori, 2022).

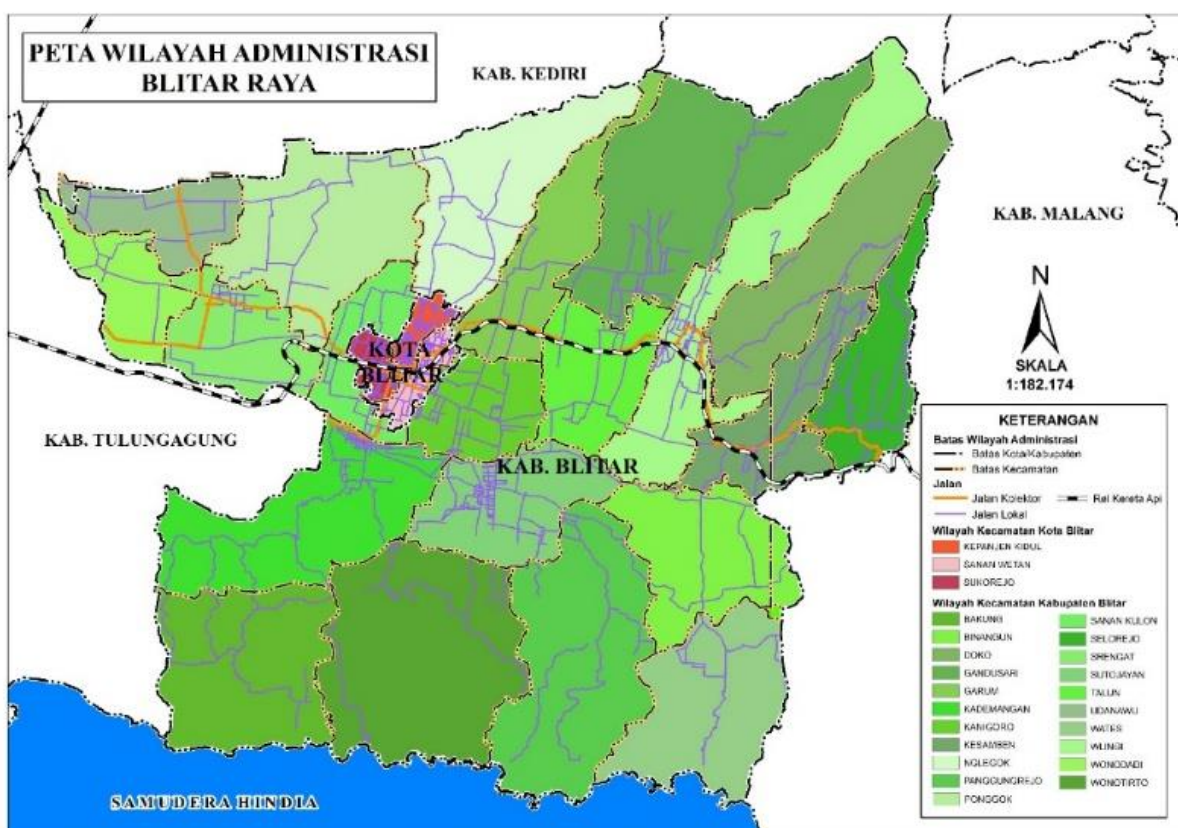
Selaras dengan perkembangan dan animo untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi, terdapat beberapa rencana pembangunan kampus di Blitar Raya. Rencana pembangunan kampus di Blitar Raya yaitu Universitas Madani Indonesia Blitar, Kampus Selorejo Universitas Insan Budi Utomo, dan Pusat Belajar UT Malang di Pondok Pesantren Sabilu Taubah. Dukungan moda transportasi di Blitar melalui Stasiun Blitar dan Terminal Patria menjadi faktor penguat Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi di wilayah selatan Provinsi

Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut, diperlukan perencanaan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan dalam mewujudkan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan baru di wilayah selatan dari Provinsi Jawa Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi didefinisikan sebagai sebuah kegiatan penelitian secara ilmiah yang dilakukan dengan kajian dan penyelidikan atas peristiwa yang dialami oleh seorang atau sekelompok makhluk hidup. Kejadian yang dijadikan bahan kajian merupakan kajian yang menarik dan merupakan pengalaman hidup (Nasir, et.al., 2023). Fenomenologi dalam perkembangan saat ini menjadi sebuah metode penelitian yang berkaitan dengan upaya menyampaikan pengalaman-pengalaman yang unik dalam masyarakat (Wita dan Mursal, 2022). Sehingga penelitian yang dilakukan didasarkan pada fenomena yang ada di Blitar Raya yang dirasakan dan diamati oleh peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan dengan lokasi di Blitar Raya yaitu Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kanigoro setelah sebelumnya satu wilayah dengan Kota Blitar. Sedangkan Kota Blitar adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang berada di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Untuk Kabupaten Blitar sendiri memiliki batas administrasi pada bagian timur dengan Kabupaten Malang, pada bagian barat dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, pada bagian selatan dengan Samudera Hindia dan pada bagian utara dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus objek penelitian mengenai peluang pengembangan potensi pendidikan tinggi di wilayah Blitar Raya.



Gambar 1. Peta Blitar Raya

Sumber : Tim Peneliti, 2024

Dalam penelitian “Peluang Blitar Raya sebagai Pusat Pendidikan Tinggi Baru di Wilayah Selatan Provinsi Jawa Timur” teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer yaitu proses pengumpulan data secara langsung. Dalam penelitian pengumpulan data primer didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara mendalam mengenai kondisi yang ada tentang perguruan tinggi di wilayah Blitar Raya. Sedangkan pengumpulan data sekunder yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi literatur terdahulu, literatur terkait, publikasi data dan informasi dari dinas dan lembaga, serta pemberitaan tentang perkembangan pendidikan tinggi yang ada di Blitar Raya.

Dalam penelitian yang dilakukan, analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Konten

Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif (Asfar dan Taufan, 2019).

2) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis untuk mendeskripsikan berbagai data dan informasi yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis ini digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil informasi dan data yang didapatkan terkait kondisi perguruan tinggi dan trend perkembangannya di Blitar Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi mendefinisikan sebagai jenjang pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi dan program spesialis yang diadakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi (Pemerintah Indonesia, 2012). Perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan diadakannya Pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan manusia yang terdidik dengan kaidah pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Indrajit & Djokopranoto, 2006). Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam penerapan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu (Marlinah, 2019):

- a. Pendidikan digunakan untuk peningkatan kemampuan dan potensi sumber daya manusia;
- b. Penelitian digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru sesuai dengan perkembangan jaman; dan
- c. Pengabdian Masyarakat digunakan untuk pelaksanaan sebuah ilmu pengetahuan agar memiliki dampak pada Masyarakat.

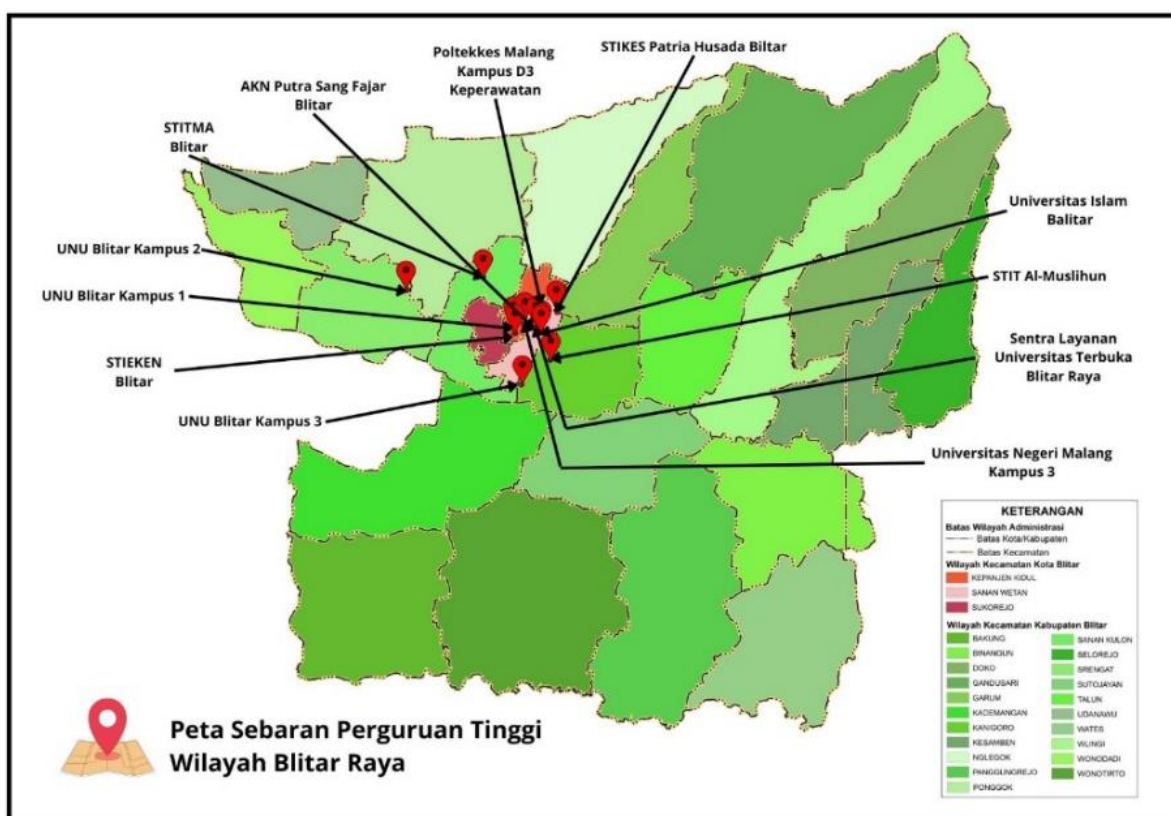
Konsep Kota Pendidikan

Konsep Kota Pendidikan merupakan sebuah upaya pengembangan kota yang menggunakan upaya pendekatan *branding* terhadap kondisi yang ada di kota dan menjadi kekhasan di kota tersebut. Melalui *city branding* maka akan terbentuk sebuah kesan seseorang terhadap sebuah kota (Haryono, 2014). Kota Pendidikan ini terkait dengan kondisi sebuah kota yang menjadi rujukan untuk migrasi para pelajar dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menuntut ilmu dan berkuliah (Zubaidah, et.al 2016). Pemilihan sebuah kota sebagai rujukan tempat menempuh pendidikan berkaitan dengan bagaimana kesan sebuah kampus dalam menarik calon mahasiswanya. Dalam kaitan dasar pemilihan sebuah kampus antara lain reputasi perguruan tinggi, biaya perkuliahan dan biaya hidup, sarana dan fasilitas penunjang, dan berbagai alasan lainnya (Lusianti dan Santoso, 2023). Perkembangan sebuah kota menjadi kota pendidikan

mendorong tumbuhnya berbagai sektor pekerjaan baru sehingga perekonomian berkembang dan migrasi penduduk juga semakin meningkat (Zubaidah, et.al 2016).

Gambaran Umum Perguruan Tinggi di Blitar Raya

Wilayah Blitar Raya yang meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar sebagai sebuah simpul pemusatan baru di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur telah berkembang pesat dalam berbagai aktivitas perekonomian dan kegiatan yang diikuti dengan perkembangan pada sektor Pendidikan khususnya pendidikan tinggi melalui berbagai perguruan tinggi yang telah tersedia di Blitar Raya. Kondisi ini selaras dengan arahan yang terdapat pada dokumen pembangunan penataan ruang RTRW Nasional, dokumen RTRW Provinsi serta arahan pada Perpres No 80 Tahun 2019 Pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Blitar Raya sebagai sebuah PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dimana kondisi ini dipertegas dalam RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024 bahwa pengembangan wilayah Blitar Raya termasuk salah satu daerah dari 8 daerah perwilayahan yang diamanatkan. Blitar Raya difokuskan pada fungsi : Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut jelas bahwa Blitar Raya memiliki salah satu fungsi wilayah sebagai pemusatan kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi.



Gambar 2. Sebaran Perguruan Tinggi Eksisting Blitar Raya

Sumber : Tim Peneliti, 2024

Perkembangan perguruan tinggi di Blitar Raya dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan tinggi untuk masyarakat Blitar Raya dan sekitarnya. Dinamika kampus dan aktivitas ikutan membawa dampak terhadap urbanisasi pelajar dan penggunaan lahan disekitar kampus (Selang, 2018). Kondisi peluang perkembangan kampus di Blitar Raya dapat terlihat dari beberapa kampus baik negeri dan swasta sebagai berikut:

1. Kampus 3 Universitas Negeri Malang

Kampus 3 Universitas Negeri Malang (UM) di Blitar memiliki sejarah yang kaya dan signifikan dalam perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Awalnya, gedung ini merupakan Meisjes Normaaalschool, sebuah sekolah guru khusus perempuan yang didirikan pada tahun 1909 pada masa Hindia Belanda. Sekolah ini memiliki masa pendidikan selama empat tahun dan menerima lulusan dari Sekolah Kelas II,

dengan pengantar bahasa daerah. Selama pendudukan Jepang, sekolah ini bertransformasi menjadi Sekolah Guru Perempuan (SGP) dan menjadi salah satu dari lima sekolah keguruan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran (Kusumo, 2018). Setelah kemerdekaan, SGP berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan akhirnya terintegrasi ke dalam IKIP Malang, yang kini dikenal sebagai Universitas Negeri Malang. Pengembangan Kampus 3 UM di Blitar merupakan upaya strategis untuk memaksimalkan potensi pendidikan di daerah tersebut, termasuk pengembangan program pascasarjana. Dengan latar belakang sejarah yang kuat, kampus ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai simbol transformasi pendidikan di Blitar yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman (Kusumo, 2018; Widyawati, 2021). Kampus ini juga mencerminkan karakteristik arsitektur kolonial yang khas, dengan elemen-elemen desain yang masih dapat dilihat hingga kini. Karakteristik tersebut mencakup penggunaan atap, dinding, pintu, jendela, ornamen, dan kolom yang mencerminkan gaya bangunan pada masa itu. Hal ini memberikan nilai tambah bagi Kampus 3 UM sebagai pusat pendidikan tinggi yang tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga mempertahankan warisan budaya lokal (Widyawati, 2021).

2. Kampus Keperawatan Blitar Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Kampus Keperawatan Blitar yang merupakan bagian dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang memiliki sejarah yang berawal dari Akademi Keperawatan Blitar. Sejak didirikan sebagai Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang pada tahun 2001, Akademi Keperawatan Blitar resmi menjadi bagian dari institusi tersebut dan bertransformasi menjadi Program Studi Keperawatan Blitar Poltekkes Kemenkes Malang (Poltekkes Kemenkes Malang, 2024). Transformasi ini menandai langkah penting dalam pengembangan pendidikan keperawatan di wilayah Blitar, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerah tersebut. Poltekkes Kemenkes Malang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten dalam bidang keperawatan. Dengan adanya kampus ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang semakin meningkat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di Blitar dan sekitarnya.

3. STIEKEN Blitar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Kesuma Negara" (STIEKEN) merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kesuma Negara Blitar. Berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Budi Dharmakusuma, S.H., dengan nomor Akta Notaris 5 pada tanggal 7 Mei 1989, STIEKEN berkedudukan di Blitar. Dalam menghadapi dinamika globalisasi, yayasan ini bertransformasi menjadi Perkumpulan Kesuma Negara Blitar pada Juli 2002. STIEKEN memperoleh izin resmi dari pemerintah melalui SK Mendikbud No. 0325/0/1990 dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia serta menyiapkan tenaga ahli di bidang manajemen dan akuntansi. Dengan demikian, STIEKEN menjadi salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Kota Blitar, menunjukkan komitmennya dalam pendidikan tinggi di kawasan tersebut (Humas STIEKEN, 2020).

4. STIT Al-Muslihuun Tlogo Blitar

Kampus STIT Al-Muslihuun Tlogo Blitar adalah perguruan tinggi agama Islam swasta yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al Muslihuun, terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Yayasan pengasuh pondok pesantren ini berhasil mendirikan Program Studi Tarbiyah dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tanggal 25 Oktober 1975 dan secara resmi mendapatkan persetujuan dari Pemkab Blitar serta terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 26 April 1976. STIT Al-Muslihuun menjadi kampus tertua di Kabupaten Blitar dan terus beroperasi hingga saat ini, berperan penting dalam pengembangan pendidikan agama Islam di daerah tersebut (STIT Al Muslihuun, 2012).

5. Universitas Islam Balitar

Universitas Islam Balitar (UNISBA) adalah kampus swasta yang mulai digagas pada tahun 2001 dan resmi didirikan pada tahun 2003. Kampus ini berada di bawah naungan Yayasan Bina Citra Anak Bangsa, dengan Surat Keputusan Nomor 147/D/02003 yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2003. UNISBA menawarkan empat fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta memiliki sembilan program studi, termasuk Teknik Elektro, Teknik Sipil, Ilmu Ternak, Agronomi, Agribisnis, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, Ilmu Komunikasi, dan Sosiologi. Sejak awal pendiriannya, UNISBA terus berkembang dan kini menjadi salah satu kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Blitar Raya (UNISBA Balitar, 2024).

6. STIKES Patria Husada
STIKES Patria Husada adalah satu-satunya kampus swasta di Blitar Raya yang fokus pada bidang kesehatan. Didirikan pada tanggal 1 September 2006 berdasarkan Keputusan Mendiknas RI Nomor 180/D/O/2006, STIKES Patria Husada memiliki visi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing. Kampus ini berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas dalam bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (STIKES Patria Husada, 2024).
7. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar) merupakan kampus swasta yang berada di bawah pengelolaan Nahdlatul Ulama. Didirikan atas inisiatif program dari LPTNU Kabupaten Blitar, UNU Blitar secara resmi diluncurkan pada tanggal 29 Oktober 2016 oleh Bupati Blitar dan Menteri Ristekdikti RI. Kampus ini bertujuan untuk memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal (UNU Blitar, 2024).
8. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Kampus Blitar
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA) Kampus Blitar merupakan hasil penggabungan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Blitar ke dalam Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Proses penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman timbal balik dalam upaya pengabdian di bidang pendidikan. Penggabungan resmi dilakukan pada bulan Oktober 2019 di Surabaya, menandai langkah penting dalam pengembangan pendidikan tinggi di Blitar (UNIPA Surabaya, 2019).
9. Akademi Komunitas Negeri Blitar
Akademi Komunitas Negeri Blitar (AKB), yang juga dikenal sebagai Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan berbasis keunggulan lokal di sekitar Kota Blitar. Awalnya, akademi ini merupakan bagian dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dan dibentuk bersama Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2002. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2012, pengelolaan program studi di Kota Blitar beralih ke Politeknik Negeri Malang. Pada tanggal 17 Oktober 2014, PDD Kota Blitar resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156 Tahun 2014 tentang pendirian dan organisasi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (AKB, 2024).
10. STITMA Blitar
STITMA Blitar adalah perguruan tinggi keagamaan yang resmi berdiri pada tahun 2022, setelah mendapatkan izin operasional dari Diktis Kementerian Agama RI. Kampus ini mengusung konsep pendidikan yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren yang tradisional dengan metode pembelajaran berbasis teknologi modern. Dengan pendekatan yang adaptif, STITMA berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dalam pendidikan, menjadikannya sebagai upaya yang responsif terhadap perkembangan zaman dalam lingkungan pesantren (Ansori, 2022).
11. SL UT Blitar
Sentra Layanan Universitas Terbuka (SL UT) Blitar merupakan salah satu pusat layanan yang menyediakan akses pendidikan tinggi di daerah tersebut. SL UT Blitar berada di bawah naungan UT Daerah Malang dan menawarkan sistem pembelajaran jarak jauh, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi secara fleksibel. Universitas Terbuka dikenal sebagai kampus negeri yang memberikan kesempatan belajar bagi berbagai kalangan dengan tata kelola pendidikan yang efisien dan mudah diakses.

Potensi dan Permasalahan Pengembangan Blitar Raya sebagai Pusat Pendidikan Tinggi

Blitar Raya memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi baru di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur, namun juga menghadapi berbagai permasalahan. Berikut adalah analisis mengenai potensi dan permasalahan tersebut:

- 1) Potensi
Blitar Raya memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan potensi tersebut:
 - a. Diversitas Institusi Pendidikan
Blitar Raya telah menjadi rumah bagi berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Balitar, STIKES Patria Husada, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Kampus Blitar. Keberadaan

institusi-institusi ini mencerminkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Diversitas ini tidak hanya memberikan pilihan bagi calon mahasiswa, tetapi juga menciptakan kompetisi sehat antar perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Diversitas institusi pendidikan tinggi menjadi hal penting dalam pengembangan kota pendidikan karena menarik calon mahasiswa, keberagaman budaya mahasiswa, dan kolaborasi multi disiplin ilmu (Suardipa, 2020).

b. Pengembangan Program Studi

Berbagai perguruan tinggi di Blitar menawarkan program studi yang beragam, mulai dari teknik, kesehatan, hingga ilmu sosial. Hal ini menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar kerja lokal. Dengan adanya program studi yang relevan, lulusan diharapkan mampu memenuhi tuntutan industri dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Program studi yang beragam akan mendorong calon mahasiswa dengan berbagai minat studi dan ketertarikan serta perkembangan prospek kerja lulusan (Sulistiyani, 2024). Kondisi keberagaman program studi menjadi salah satu factor penting penunjang kota pendidikan.

c. Keterlibatan Komunitas

Perguruan tinggi seperti Akademi Komunitas Negeri Blitar dan STITMA Blitar menunjukkan komitmen dalam pengembangan komunitas lokal melalui pendidikan berbasis pesantren dan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Adanya perguruan tinggi di sebuah kota mendorong berbagai komunitas untuk bekerja sama (Andayani & Afandi, 2019).

d. Inovasi Pendidikan

Beberapa institusi telah mulai mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan media digital dan pembelajaran jarak jauh. Inovasi ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk hadir secara fisik di kampus. Dengan memanfaatkan teknologi, perguruan tinggi di Blitar Raya dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif (Fitriana, 2019). Kondisi inovasi penting dalam memberikan posisi yang berbeda kota pendidikan yang lain.

e. Akses dan Kualitas Pendidikan

Kehadiran berbagai kampus baik negeri maupun swasta di Blitar Raya berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat lokal. Dengan kampus yang dekat, masyarakat tidak perlu merantau jauh ke kota-kota besar, sehingga biaya pendidikan dapat ditekan. Ini juga memungkinkan pengembangan ekosistem penelitian dan inovasi teknologi yang dapat mendorong kemajuan pendidikan tinggi di wilayah tersebut (Kemdikbud RI, 2024; BPS Kota Blitar, 2024 dan BPS Kabupaten Blitar 2024).

f. Kolaborasi Industri dan Perguruan Tinggi

Blitar Raya memiliki potensi komoditas unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan industri kecil yang terus berkembang. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri dapat menghasilkan inovasi teknologi serta alat-alat yang tepat guna untuk mendukung sektor-sektor tersebut. Melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dalam menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan (Wati et.al, 2022).

g. Peningkatan Minat Melanjutkan Jenjang Pendidikan Tinggi

Data statistik dari BPS Kota Blitar dan Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Tren positif ini mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya, memberikan peluang besar bagi Blitar Raya untuk menarik lebih banyak mahasiswa ke perguruan tinggi lokal.

2) Permasalahan

Pengembangan pendidikan tinggi di Blitar Raya menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi oleh institusi pendidikan di wilayah ini:

a. Infrastruktur yang Terbatas

Meskipun terdapat banyak institusi pendidikan, infrastruktur pendukung seperti fasilitas belajar, laboratorium, dan akses transportasi masih memerlukan perhatian serius. Banyak kampus yang

belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Keterbatasan ini dapat menghambat kualitas pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa, sehingga perlu adanya investasi dalam pengembangan infrastruktur pendidikan (Alfarizi et.al, 2022).

- b. **Kualitas Pendidikan yang Beragam**
Terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan antar perguruan tinggi di Blitar Raya. Beberapa institusi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi pengajaran maupun fasilitas, untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas lulusan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi reputasi pendidikan tinggi di wilayah tersebut (Alfarizi et.al, 2022).
- c. **Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya**
Pengelolaan sumber daya manusia dan finansial di perguruan tinggi menjadi tantangan tersendiri. Banyak institusi menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran dan sumber daya dengan efisien. Diperlukan strategi manajerial yang baik untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan institusi. Tanpa pengelolaan yang efektif, institusi pendidikan akan kesulitan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan (Iskandar et.al, 2023).
- d. **Persaingan dengan Daerah Lain**
Blitar Raya harus bersaing dengan daerah lain yang juga mengembangkan pusat pendidikan tinggi. Persaingan ini menuntut perguruan tinggi untuk memiliki strategi pemasaran dan branding yang efektif agar dapat menarik mahasiswa baru. Jika tidak, institusi pendidikan di Blitar Raya berisiko kehilangan potensi calon mahasiswa ke kampus-kampus di daerah lain yang menawarkan fasilitas atau program studi lebih menarik (Sukmaniar et.al, 2018).
- e. **Kualitas Kampus**
Kualitas kampus di Blitar Raya masih menjadi masalah utama. Berdasarkan data BAN-PT, hanya Universitas Negeri Malang yang memiliki akreditasi unggul, sementara kampus lainnya memiliki akreditasi baik sekali atau baik. Ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dari institusi kampus dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk meningkatkan standar akademik dan kualitas layanan pendidikan (Iskandar et.al, 2023).
- f. **Relevansi Pembelajaran dengan Kebutuhan Industri**
Kurikulum pendidikan tinggi sering kali tidak selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja. Hal ini menyebabkan lulusan mengalami kesenjangan pengetahuan dan keterampilan saat memasuki dunia kerja, sehingga mereka perlu waktu tambahan untuk beradaptasi. Perguruan tinggi perlu memperbarui kurikulum mereka agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan siap pakai dan mampu bersaing di pasar kerja (Jaya et.al, 2023).
- g. **Implementasi Teknologi**
Di era digital saat ini, implementasi teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Namun, Blitar Raya menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses digital, masalah privasi, dan risiko keamanan siber. Akses teknologi dan informasi yang belum merata pada jenjang pendidikan menengah juga menjadi kendala bagi calon mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi pembelajaran berbasis teknologi (Sukmaniar et.al, 2018).

Rencana Pengembangan Kampus Baru di Blitar Raya

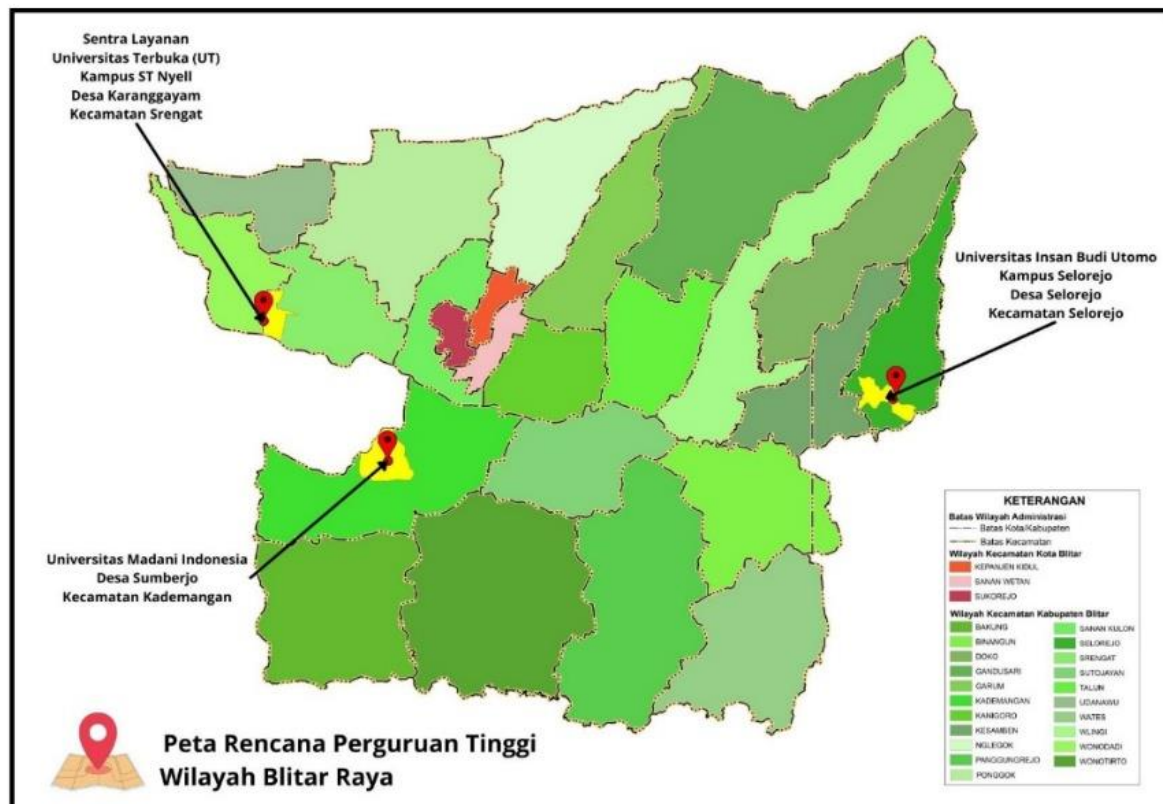
Pengembangan kampus baru di Blitar Raya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi sekaligus mendukung pembangunan wilayah. Berdasarkan teori pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan tinggi berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, mendorong inovasi, dan memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dengan masyarakat lokal. Berikut adalah rencana pengembangan kampus di Blitar Raya:

1) Pengembangan Aktivitas Kampus 3 Universitas Negeri Malang

Kampus 3 Universitas Negeri Malang (UM) di Blitar menunjukkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru dan pembukaan program studi baru, kampus ini berencana membangun fasilitas tambahan untuk mendukung aktivitas akademik. Selama ini, Kampus 3 UM digunakan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, namun rencana ke depan mencakup perluasan untuk fakultas lain serta pembukaan program pascasarjana. Pengembangan ini sejalan dengan teori regional development, di mana institusi pendidikan tinggi berfungsi sebagai pusat

inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kualitas SDM dan penelitian (Vionita, 2024).

- 2) Pendirian Kampus Baru Universitas Madani Indonesia di Blitar Selatan
Universitas Madani Indonesia (UMIN) didirikan dengan tujuan mengembangkan wilayah selatan Blitar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pembangunan dibandingkan wilayah utara. Pendirian kampus di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan regional. Menurut teori pembangunan wilayah (*regional disparity theory*), pendirian institusi pendidikan di daerah tertinggal dapat menjadi katalisator pembangunan sosial-ekonomi melalui peningkatan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja (Andiaskiton, 2019).
- 3) Rencana Pendirian Kampus Layanan UT Blitar di Pondok Pesantren Mambaul Hikam
Blitar Raya memiliki potensi besar dalam integrasi pendidikan tinggi dengan aktivitas keagamaan melalui pendirian Sentra Layanan Universitas Terbuka (UT) di Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Kerja sama antara UT Malang dan Majelis Sabilu Taubah bertujuan memberikan kemudahan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Blitar bagian barat dan Kabupaten Tulungagung yang berbatasan dengan Blitar. Pendekatan ini relevan dengan teori *community-based education*, yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal serta memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan komunitas (Islami et.al, 2024).
- 4) Rencana Pengembangan Kampus Baru Universitas Insan Budi Utomo di Selorejo Blitar
Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) berencana mendirikan kampus baru di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat wilayah timur Blitar yang berbatasan dengan Kabupaten Malang. Pembangunan kampus ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di Selorejo. Pendekatan ini sesuai dengan *teori economic spillover*, yang menjelaskan bagaimana institusi pendidikan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui investasi infrastruktur dan peningkatan aktivitas masyarakat sekitar (Suparta, 2009).



Gambar 3. Lokasi Rencana Pembangunan Kampus Baru Blitar Raya

Sumber: Tim Peneliti, 2024

Kondisi Pengembangan Blitar Raya sebagai Pusat Pendidikan Tinggi di Wilayah Selatan Jawa Timur

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat potensi besar untuk mengembangkan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi baru di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur. Upaya ini memerlukan perhatian terhadap pengoptimalan potensi yang ada serta penanganan permasalahan yang dihadapi. Beberapa faktor yang mendukung pengembangan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi meliputi:

1) Dukungan Layanan Transportasi

Blitar Raya, sebagai pusat kegiatan pendidikan, memiliki dukungan moda transportasi yang memadai. Beberapa sarana transportasi yang dapat memperkuat pengembangan kawasan ini sebagai pusat pendidikan tinggi antara lain:

a. Stasiun Besar Kota Blitar

Stasiun Kereta Api Kelas Besar Tipe B di pusat Kota Blitar berfungsi sebagai sarana transportasi penting. Keberadaan stasiun ini memudahkan mahasiswa dari berbagai daerah untuk mengakses pusat pendidikan di Blitar Raya. Dengan adanya jadwal kereta api jarak jauh dan layanan commuter line seperti KA CL Penataran dan CL Dhoho, mahasiswa dapat dengan mudah bepergian ke dan dari Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur.

b. Terminal Tipe A Patria Kota Blitar

Terminal Tipe A Patria yang terletak di Kota Blitar menyediakan layanan transportasi darat yang esensial bagi mahasiswa dari daerah-daerah yang tidak terlayani oleh kereta api. Dengan fasilitas ini, mahasiswa dapat menggunakan bus untuk mencapai kampus-kampus di Blitar, sehingga meningkatkan aksesibilitas pendidikan.

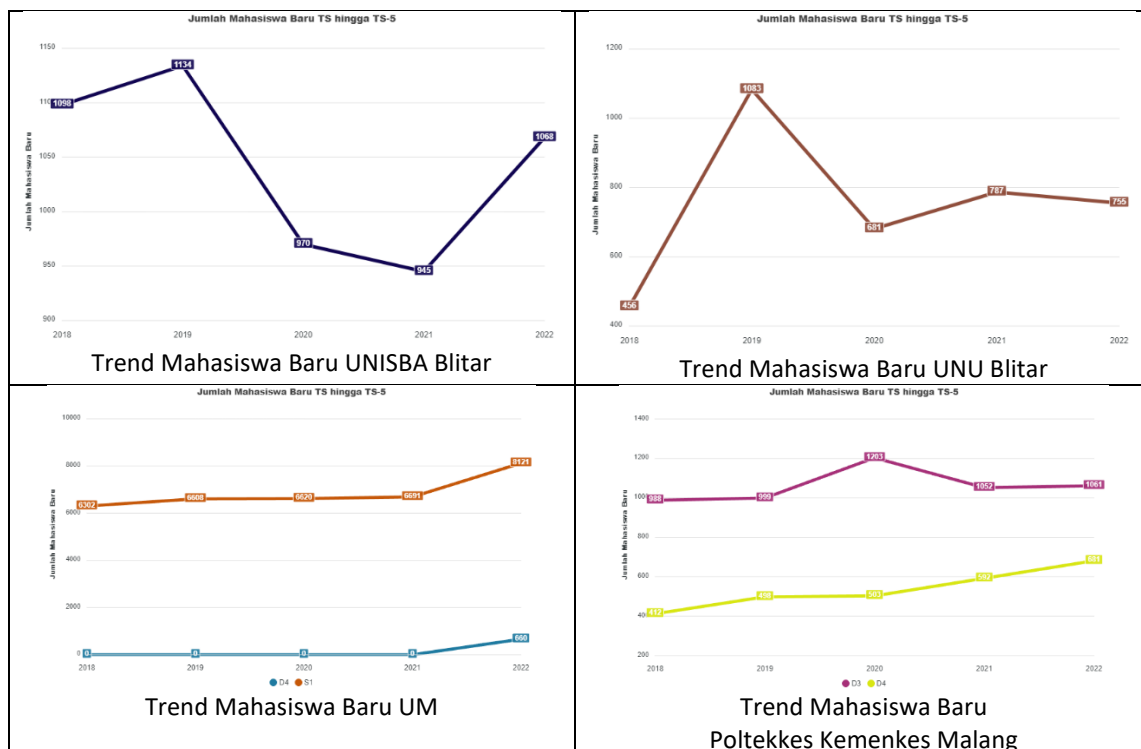
c. Dekat dengan Bandara Dhoho Kediri

Keberadaan Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan peluang strategis untuk pengembangan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi. Akses langsung dari bandara menuju Terminal Tipe A Patria memudahkan mahasiswa dari daerah jauh, termasuk luar pulau, untuk mencapai Blitar Raya dengan lebih cepat dan efisien. Trend Jumlah Mahasiswa pada Kampus Eksisting

Pengembangan infrastruktur transportasi yang baik sangat penting dalam mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi, sesuai dengan teori *transportation accessibility*, yang menekankan bahwa kemudahan akses transportasi berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dengan memanfaatkan potensi infrastruktur transportasi ini, Blitar Raya dapat mengoptimalkan pengembangan sebagai pusat pendidikan tinggi yang menarik bagi mahasiswa dari berbagai daerah (Irawan et.al, 2024).

2) Peningkatan Jumlah Mahasiswa

Pengembangan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi baru sangat dipengaruhi oleh potensi jumlah mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di kawasan ini. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa dua kampus swasta utama di Blitar Raya, yaitu Universitas Islam Balitar (UNISBA) dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, mengalami tren positif dalam jumlah mahasiswa baru, dengan UNISBA mencatat sekitar 1.000 mahasiswa baru dan UNU sekitar 700 mahasiswa baru. Adanya perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Negeri Malang (UM) yang memiliki Kampus 3 di Blitar, juga berkontribusi pada pertumbuhan jumlah mahasiswa secara keseluruhan. UM menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah mahasiswa baru, yang dapat mempengaruhi daya tarik perguruan tinggi lainnya di Blitar. Selain itu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang memiliki layanan kampus keperawatan di Blitar juga mengalami tren peningkatan jumlah mahasiswa baru. Kondisi ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa dapat dilayani dengan baik oleh kampus-kampus negeri yang ada di Blitar. Akademi Komunitas Negeri Blitar juga sedang merencanakan pembangunan gedung baru serta pembukaan beberapa program studi baru yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Upaya ini mencerminkan teori *growth theory*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendidikan tinggi dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, dengan adanya dukungan dari berbagai institusi pendidikan dan kebijakan yang tepat, Blitar Raya memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pendidikan tinggi yang menarik bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah.



Gambar 4. Trend Perkembangan Mahasiswa Baru Beberapa Kampus

Sumber: <https://pemutu.kemdikbud.go.id/>, 2024

- 3) **Potensi Sektor Unggulan Daerah dan Perkembangan Investasi Blitar Raya**
Blitar Raya memiliki berbagai komoditas dan sektor unggulan yang berpotensi mendukung pengembangan pusat pendidikan tinggi baru di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur. Sektor pariwisata, yang mencakup objek-objek seperti Makam Bung Karno, Wisata Sejarah PETA, Candi Penataran, dan Pantai Selatan Blitar, menawarkan daya tarik yang signifikan bagi calon mahasiswa. Keberadaan tempat-tempat wisata ini tidak hanya menarik pengunjung tetapi juga menciptakan lingkungan yang kaya budaya dan sejarah, yang dapat menjadi nilai tambah bagi pengalaman belajar mahasiswa. Selain sektor pariwisata, Blitar Raya juga dikenal dengan komoditas unggulan lainnya. Produksi telur di daerah ini menjadikannya salah satu sentra telur di provinsi, sementara budidaya ikan koi yang terkenal dapat mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang perikanan. Komoditas pertanian seperti nanas dan belimbing juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya pendidikan tinggi yang fokus pada penelitian dan pengembangan di sektor-sektor ini, Blitar Raya dapat meningkatkan kualitas produk lokal dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Pentingnya dukungan pendidikan tinggi dalam mengoptimalkan potensi sektor unggulan daerah sejalan dengan *teori economic development*, yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang baik dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong inovasi dalam sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, pengembangan pusat pendidikan tinggi di Blitar Raya tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan ini, Blitar Raya dapat menjadi lokasi strategis untuk pengembangan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) **Keterbatasan Layanan Pendidikan Tinggi di Wilayah Selatan sekitar Blitar Raya**
Keterbatasan layanan pendidikan tinggi di wilayah selatan sekitar Blitar Raya menjadi isu penting yang perlu diatasi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Secara umum, wilayah selatan Provinsi Jawa Timur mengalami keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi negeri. Hal ini terlihat dari keberadaan kampus negeri yang relatif sedikit di daerah tersebut. Misalnya, di Kabupaten Pacitan terdapat Akademi Komunitas Negeri Pacitan, sementara Tulungagung memiliki UIN Satu Tulungagung. Di Blitar sendiri, terdapat Universitas Negeri Malang (UM) Kampus 3, Politeknik Kesehatan Malang

Kampus Blitar, dan Akademi Komunitas Negeri Blitar. Namun, untuk daerah lain seperti Malang dan Jember, yang memiliki banyak universitas negeri, akses pendidikan tinggi lebih mudah dijangkau karena adanya konsentrasi kampus yang lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah selatan cenderung mengandalkan pusat-pusat pendidikan yang berada di Malang dan Jember, sehingga upaya untuk menjadikan Blitar Raya sebagai pemusatan pendidikan tinggi baru sangat potensial. Dengan peningkatan jumlah institusi pendidikan tinggi di Blitar, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kampus-kampus yang lebih jauh dan memberikan akses yang lebih baik bagi calon mahasiswa.

5) Jaringan Jalan Lintas Selatan

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mengembangkan wilayah selatan adalah pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JLS). Saat ini, proses penyelesaian jaringan jalan ini sedang dipercepat, yang diharapkan akan mempermudah akses ke daerah-daerah selatan, termasuk Blitar Raya. Dengan tersambung JLS, mobilitas masyarakat dan mahasiswa akan meningkat, sehingga pengembangan pusat pendidikan tinggi di Blitar Raya menjadi lebih mudah dicapai. Aksesibilitas yang lebih baik akan menarik lebih banyak calon mahasiswa dari daerah lain untuk berkuliah di Blitar.

6) Dukungan Pemangku Kepentingan

Keberhasilan pengembangan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi juga sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi kebijakan, upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pengembangan Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur yang menekankan pentingnya pengembangan pendidikan. Inisiatif dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui bantuan biaya pendidikan juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya visi dan misi untuk meningkatkan kualitas SDM unggul dalam dokumen pembangunan daerah, serta keseriusan institusi pendidikan di Blitar dalam meningkatkan kualitas dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, potensi pengembangan pusat pendidikan tinggi di Blitar Raya dapat terwujud. Upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat akan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pendidikan tinggi di wilayah ini.

KESIMPULAN

Pengembangan Blitar Raya sebagai pusat pendidikan tinggi baru di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang signifikan dan strategis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor kunci yang mendukung pengembangan ini, antara lain aksesibilitas pendidikan, peningkatan jumlah mahasiswa, potensi sektor unggulan daerah, serta dukungan infrastruktur transportasi dan pemangku kepentingan. Kehadiran berbagai institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, menunjukkan adanya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Peningkatan jumlah mahasiswa di kampus-kampus seperti Universitas Islam Balitar dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar mencerminkan tren positif yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Blitar Raya sebagai pusat pendidikan. Selain itu, sektor unggulan seperti pariwisata dan komoditas lokal juga memberikan peluang bagi pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan layanan pendidikan tinggi dan persaingan dengan daerah lain, upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti Jaringan Jalan Lintas Selatan dan dukungan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan menjadi langkah positif. Keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun institusi pendidikan, sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan ini. Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, Blitar Raya berpeluang untuk berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat regional dan nasional. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mewujudkan visi ini demi kemajuan pendidikan di Blitar Raya.

REFERENSI

1. AKB. (2024). akb.ac.id. Retrieved from Sejarah AKB: <https://akb.ac.id/akblitar/tentang-akb/sejarah-akb/>
2. Alfarizi, A., Alie, J., & Yustini, T. (2022). Pengaruh Brand Image, Lokasi Kampus dan Dukungan Fasilitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 31-44.
3. Ananta, A., Brantasari, M., Anggraeni, A., & Warman, W. (2024). Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga di Kalimantan Timur. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 9(2), 128-135.
4. Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan pendampingan komunitas penyandang disabilitas dalam mengakses Pendidikan tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 16(2), 153-166.
5. Andiaskiton, M. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68-80.
6. Ansori, R. W. (2022, Oktober 22). STITMA Blitar sebagai Ruang Pengeraman Ilmu Pengetahuan dan Agama. Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/redhitya-wempi/stitma-blitar-sebagai-ruang-pengeraman-ilmu-pengetahuan-dan-agama-1z4gQUV0RrT/full>
7. Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). no. January, 1-13.
8. Christi, S. R. N., & Petrus, R. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi di Bidang Teknologi dalam Menyambut Era Society 5.0. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 168-175.
9. Fitriana, S. (2019). Transformasi pendidikan tinggi di era disrupsi (dampak dan konsekuensi inovasi). In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 2, No. 1, pp. 812-818).
10. Harahap, D. A., Amanah, D., Gunarto, M., Purwanto, P., & Umam, K. (2020). Pentingnya citra universitas dalam memilih studi di perguruan tinggi. *Niagawan*, 9(3), 191-196.
11. Haryono, S. (2014). Analisis brand image Yogyakarta sebagai kota pelajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 301-309.
12. Humas STIEKEN. (2020, Januari 28). Sejarah STIE Kesuma Negara Blitar. Retrieved from humas.stieken.ac.id: <https://humas.stieken.ac.id/sejarah-stie-kesuma-negara-blitar/>
13. Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen perguruan tinggi modern* (Vol. 1). Andi.
14. Irawan, P. S., Agustian, F. D., & Lestarikan, D. P. (2024). Identifikasi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender Dalam Akses Dan Partisipasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 493-500.
15. Iskandar, J., Muharam, H., Pranowo, A. S., & Gunawan, Y. I. (2023). Peran Brand Image Memediasi Pengaruh Electronic Word Of Mouth Dan Promosi Online Terhadap Keputusan Memilih Program Studi S1 Manajemen Universitas IPWIJA. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(6), 2488-2512.
16. Islami, J. M. M., Ilmin, L., Afny, D. N., Supriyanto, A., & Habibi, M. M. (2024). SLR: Penerapan Pembelajaran Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik di Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2832-2848.
17. Istiyani, N., Viphindartin, S., Nurhardj, B., & Restiawan, A. I. (2022). Analisis PDRB, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Istiqro*, 8(2), 121-128.
18. Jaya, H., Hambali, M., & Fakhurrozi, F. (2023). Transformasi pendidikan: peran pendidikan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2416-2422.
19. Kemdikbud RI. (2024). APK dan APM. Retrieved from apkpm.data.kemdikbud.go.id: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>

20. Kusumo, B. E. (2018, Juli 13). Gedung Kampus 3 Universitas Malang. Retrieved from kekunaan.blogspot.com: <https://kekunaan.blogspot.com/2018/07/gedung-kampus-3-universitas-malang.html>
21. Lusianti, D., & Santoso, I. H. (2023). Preferensi dalam Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta: Aspek Fisik di Era Pembelajaran Berbasis Internet. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 223-232.
22. Marlinah, L. (2019). Pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang berjiwa inovator dan technopreneur menyongsong era society 5.0. *Ikraith-Ekonomika*, 2(3), 17-25.
23. Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451.
24. Pemerintah, R.I. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Presiden Republik Indonesia : Jakarta.
25. Permana, H. J., & Kamela, H. (2023). Analisis Persepsi Kampus Terhadap Keputusan Calon Mahasiswa Dalam Menentukan Pendidikan di Universitas Raharja. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(02), 109-116.
26. Poltekkes Kemenkes Malang. (2024). Sejarah Poltekkes Kemenkes Malang. Retrieved from www.poltekkes-malang.ac.id: <https://www.poltekkes-malang.ac.id/index.php/sugeng/halamanstatis/statis-1>
27. Ramadhan, R. F., & Amalia, L. F. (2023). Pembekalan dan sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi bagi generasi Z di era 5.0. *Journal of Research Applications in Community Service*, 2(2), 59-65.
28. Septarina, A. A., Widaningrum, A. H., Ratnasari, N., Tarecha, R. I., & Darajat, P. P. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 526-533.
29. Selang, M. A. (2018, February). Tingkat Perkembangan Urbanisasi Spasial Di Pinggiran Kpy (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) Tahun 2012-2016. In *Prosiding Seminar Kota Layak Huni/Livable Space*.
30. STIKES Patria Husada. (2024). Tentang Kampus. Retrieved from phb.ac.id: <http://phb.ac.id/about/#:~:text=STIKes%20Patria%20Husada%20Blitar%20merupakan,yang%20kompeten%20dan%20berdaya%20saing.>
31. STIT Al Muslihuun. (2012, Agustus). Sejarah Kampus. Retrieved from stitalmuslihuun.wordpress.com: <https://stitalmuslihuun.wordpress.com/2012/12/28/sejarah/>
32. Suardipa, I. P. (2020). Diversitas sistem pendidikan di finlandia dan relevansinya dengan sistem pendidikan di indonesia. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 2(2), 68-77.
33. Sukmaniar, S., Romli, M. E., & Sari, D. N. (2018). Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi pada Mahasiswa dari Desa untuk Kuliah di Kota Palembang. *Demography journal of sriwijaya*, 1(2), 1-10.
34. Sulistiyani, S. (2024). *Peran Prospek Kerja Dalam Memoderasi Pengambilan Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun (Kasus Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi)* (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Madiun).
35. Suparta, I. W. (2009). Spillover Effect Perekonomian Provinsi Dki Jakarta dan sumatera selatan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 32-48.
36. UNIPA Surabaya. (2019, Oktober 22). unipasby.ac.id. Retrieved from STKIP PGRI Blitar dan STKIP PGRI Lamongan Resmi Merger ke Unipa Surabaya: <https://unipasby.ac.id/index/det/2019/10/stkip-pgri-blitar-dan-stkip-pgri-lamongan-resmi-merger-ke-unipa-surabaya>
37. UNISBA Balitar. (2024). Sejarah UNISBA Balitar. Retrieved from unisbablitar.ac.id: <https://unisbablitar.ac.id/logo-universitas-islam-balitar/#:~:text=Universitas%20Islam%20Balitar%20secara%20resmi,program%20studi%20di%20awal%20pendiriannya.>
38. UNU Blitar. (2024). Sejarah. Retrieved from unublitar.ac.id: <https://unublitar.ac.id/konten/12/sejarah.html>

39. Vionita, B. S. (2024). Education and Culture: Boosting Regional Competitiveness and Accelerating Economic Growth. *Subang International Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 35-42.
40. Wati, C. N., Sukestiyarno, Y. L., Sugiharto, D. Y. P., & Pramono, S. E. (2022, September). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 5, No. 1, pp. 202-207).
41. Widyawati, S. (2021). Kampus 3 UM Di Blitar Bakal Dimanfaatkan Untuk Program Pascasarjana Tahun Depan. <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/11/01/kampus-3-um-di-blitar-bakal-dimanfaatkan-untuk-program-pascasarjana-tahun-depan>
42. Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam kajian sosial sebuah studi tentang konstruksi makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325-338.
43. Zubaidah, E., Pratiwi, P. H., Hamidah, S., & Mustadi, A. (2016). Migrasi Pelajar dan Mahasiswa Pendetang di Kota Pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional UNY*.



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Dinamika Kebijakan Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Blitar

Caesar Demas Edwinarta¹

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Blitar, Indonesia¹
caesardemas@gmail.com

Abstract

This article presents an analysis of the policy dynamics surrounding the implementation of Non-Tax State Revenue (PNBP) in passport services at the Blitar Immigration Office. The issuance of Government Regulation Number 45 of 2024, which amends Government Regulation Number 28 of 2019, has brought changes to the structure of passport-related PNBP, effective from December 17, 2024. Key amendments in the new policy include distinctions in PNBP implementation based on the validity period of the passport—five or ten years—as well as the type of passport selected. This represents a shift from the previous regulation, which differentiated PNBP solely based on passport type, namely ordinary non-electronic passports and electronic passports. This study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzed through the lens of public policy theory and policy implementation concepts. The findings are expected to serve as a reference for evaluating and reformulating an ideal PNBP policy for passports—one that comprehensively governs PNBP arrangements from an immigration policy perspective.

Keywords: Service; Passport; Policy; Immigration; PNBP.

Abstrak

Artikel ini merupakan analisis terhadap dinamika kebijakan penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Blitar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 memberikan dampak perubahan PNBP Paspor yang mulai diterapkan pada tanggal 17 Desember 2024. Poin-poin perubahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut mencakup pada pembedaan penerapan PNBP bagi paspor dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun, selain dengan pembedaan pada jenis paspor yang dipilih. Kebijakan pembedaan penerapan PNBP merupakan perubahan terhadap peraturan yang lama yang hanya mengatur mengenai pembedaan penerapan PNBP Paspor berbasis pada jenis paspor saja, yaitu paspor biasa non-elektronik dan paspor elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang dianalisis menggunakan teori kebijakan publik dan konsep implementasi kebijakan. Hasil penelitian

INFORMASI ARTIKEL

Naskah diterima: 27/03/2025
Revisi: 06/05/2025
Diterima untuk dipublikasi: 08/05/2025

doi: -

© 2025 Jurnal Pradah

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH
Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar,
Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40,
Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117
Telepon: (0342) 808165
Fax: (0342) 806275
E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan reformulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor yang ideal dan telah mencakup keseluruhan pengaturan kebijakan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian.

Kata Kunci: Pelayanan; Paspor; Kebijakan; Keimigrasian; PNPB.

PENDAHULUAN

Imigrasi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kompleksitas tugas dan fungsi yang mencakup pada pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan masyarakat (Edwinarta, 2024:1). Dalam upaya menunjang tugas dan fungsi tersebut, pemerintah senantiasa berupaya menyesuaikan kondisi pelayanan publik yang dilaksanakan dengan pendapatan negara yang didapatkan melalui kebijakan penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pelayanan Keimigrasian.

Kebijakan penerapan PNPB bagi pelayanan Keimigrasian telah mengalami beberapa perubahan secara dinamis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung di tengah masyarakat. Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengaturan terkait dengan PNPB pada layanan Keimigrasian telah beberapa kali mengalami perubahan hingga saat ini.

Pengaturan PNPB layanan Keimigrasian dalam 10 tahun terakhir telah beberapa kali diubah, hal ini diawali dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini kemudian diubah dalam PP Nomor 10 Tahun 2015, lalu menjadi PP Nomor 45 Tahun 2016, kemudian terbit PP Nomor 28 Tahun 2019 hingga diganti kembali menjadi PP Nomor 45 Tahun 2024. PP yang diterbitkan merupakan PP yang mengatur keseluruhan PNPB di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, termasuk mengatur perihal PNPB yang berkaitan dengan layanan Keimigrasian yang terdiri atas pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, serta Biaya Beban atas kesalahan atau pelanggaran terhadap administrasi Keimigrasian.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Penerapan PNPB Paspor Dalam Dinamika Peraturan Pemerintah Tentang PNPB Kemenkumham

Indikator	Kategorisasi Peraturan Pemerintah				
	PP 45/2014	PP 10/2015	PP 45/2016	PP 28/2019	PP 45/2024
Jenis PNPB yang diatur	PNBP Paspor Biasa 24 hlm, Paspor Elektronik 24 hlm, Paspor Biasa 48 hlm, Paspor Elektronik 48 hlm dan biaya jasa biometrik.	PNBP Paspor Biasa 24 hlm, Paspor Elektronik 24 hlm, Paspor Biasa 48 hlm dan Paspor Elektronik 48 hlm.	PNBP Paspor Biasa 24 hlm, Paspor Elektronik 24 hlm, Paspor Biasa 48 hlm dan Paspor Elektronik 48 hlm.	Paspor Biasa 48 hlm dan Paspor Elektronik 48 hlm.	Paspor Biasa 48 hlm 5 tahun, Paspor Biasa 48 hlm 10 tahun, Paspor Elektronik 48 hlm 5 tahun, dan Paspor Elektronik 48 hlm 10 tahun.

Sumber: Peraturan Pemerintah PNPB Kemenkumham diolah oleh penulis, 2024

Sebagai salah satu aspek yang diatur dalam kebijakan penerapan PNPB di lingkungan Kemenkumham RI, kebijakan penerapan PNPB bagi pelayanan paspor juga beberapa kali diubah menyesuaikan dengan kebijakan pelayanan paspor yang juga berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya dalam hal penerapan PNPB bagi pelayanan paspor biasa yang berubah setelah penerapan kebijakan paspor elektronik, termasuk juga penerapan biaya beban yang juga berubah seiring dengan perubahan kebijakan penerapan PNPB tersebut. Dalam kebijakan penerapan PNPB berdasarkan PP yang terbaru yaitu PP Nomor 45 Tahun 2024, diatur beberapa perubahan yang mengubah kebijakan pelayanan paspor di Indonesia, di antaranya adalah mengenai penerapan PNPB paspor dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun yang berlaku secara opsional sehingga menghasilkan variasi PNPB paspor yang berbeda dengan kebijakan terdahulu yang menerapkan kebijakan PNPB tunggal bagi permohonan paspor tanpa memberikan pilihan masa berlaku paspor dan hanya membedakan permohonan paspor berdasarkan jenis paspor yang dipilih.

Perubahan kebijakan penerapan PNPB paspor juga berdampak pada penerapan kebijakan layanan paspor pada aspek lain, seperti perubahan kebijakan pemilihan jenis paspor yang diterapkan pada aplikasi M-Paspor yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemohon paspor untuk mengajukan permohonan paspornya secara *online*. Pembagian pemilihan jenis paspor menjadi lebih kompleks setelah diterapkannya kebijakan penerapan PNPB yang baru dengan menambahkan pilihan masa berlaku paspor setelah pemohon memilih jenis paspor yang dikehendaki untuk diajukan dalam permohonan paspor. Kompleksitas kebijakan pelayanan paspor pasca penerapan kebijakan penerapan PNPB yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 ini yang kemudian menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian?

Kajian dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian dikaji dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan konsep formulasi kebijakan publik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikaji bersamaan dengan metode studi pustaka dengan perbandingan formulasi kebijakan terdahulu. Penelitian ini menggunakan informan yang merupakan praktisi kebijakan dan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penerapan PNPB Paspor yang diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi proses analisis kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian.

Kompleksitas kebijakan pelayanan paspor pasca penerapan kebijakan penerapan PNPB yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 ini yang kemudian menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian?

Kajian dinamika formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian dikaji dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan konsep formulasi kebijakan publik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikaji bersamaan dengan metode studi pustaka dengan perbandingan formulasi kebijakan terdahulu. Penelitian ini menggunakan informan yang merupakan praktisi kebijakan dan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penerapan PNPB Paspor yang diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi proses analisis kebijakan penerapan PNPB Paspor dalam perspektif Keimigrasian.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori kebijakan publik yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah (Romadlon, 2023:22). Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat yang terkadang berkaitan dengan kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, serta melindungi hak-hak dasar masyarakat (Agustino, 2023:5). Dalam konteks yang terjadi pada penelitian ini, kebijakan penerapan PNPB Paspor diformulasikan dalam rangka penyesuaian keadaan dan kondisi pelayanan paspor yang dilaksanakan saat ini. Pembaruan terhadap kebijakan ini merupakan proses yang secara berkala dilaksanakan untuk mengatur kesesuaian PNPB Paspor dengan inovasi atau perbaikan layanan paspor.

Hal ini sejalan dengan pemaknaan atas kebijakan yang merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil keputusan bagi publik yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi kepada kepentingan publik (Kurniawan, 2017:17). Oleh karena itu, konsep implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) (Katharina, 2020:90-91). Implementasi kebijakan merupakan elemen penting dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan publik yang efektif dan dapat dianggap berhasil (Nugroho, 2014:225). Dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan yang efektif, diperlukan pertimbangan terhadap komunikasi, sumber daya, disposisi sikap dan struktur birokrasi (Tangkilsan, 2003:11).

Implementasi kebijakan penerapan PNPB Paspor dipahami sebagai sebuah kebijakan yang berupaya menyesuaikan penerimaan PNPB yang berasal dari pelayanan paspor dengan pembaruan kebijakan yang berlaku pada proses pelayanan paspor itu sendiri. Terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2024 merupakan upaya penyesuaian penerimaan PNPB Paspor pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Formulasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan penyesuaian terhadap penerimaan PNPB yang berasal dari pelayanan paspor dengan pembaruan kebijakan pelayanan paspor sesuai dengan konsep formulasi kebijakan yang berupaya

memberikan suatu tatanan yang menghasilkan kemampuan untuk mengantisipasi implikasi dari kebijakan tersebut, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik (Anggara, 2018:55).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai sarana pengumpulan data primer yang diharapkan mampu mengeksplorasi tindakan dan pikiran informan sekaligus menemukan solusi atas permasalahan yang dianalisis (Harrison, 2016:91-92). Pendekatan kualitatif juga dipahami sebagai penelitian naturalistik yang mempertahankan kondisi alamiah penelitian tanpa manipulasi dari peneliti sehingga tidak mempengaruhi dinamika yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019:17). Penelitian kualitatif berupaya memadukan teori dan metode dalam suatu metodologi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan gabungan metodologi tersebut untuk menghasilkan suatu elemen penelitian tertentu (Amrullah, 2022:12).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang merupakan penyajian data berdasarkan literatur yang telah dibaca atau didapatkan oleh peneliti yang dapat berupa buku atau artikel sehingga dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dari suatu permasalahan yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan (Afrizal, 2014:122). Metode studi pustaka merupakan perpaduan upaya pengumpulan sumber informasi primer dan sekunder melalui tahapan pengklasifikasian data sehingga dihasilkan sebuah data yang disarikan dari pengolahan atau pengutipan referensi yang diinterpretasikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atas penelitian tersebut (Darmalaksana, 2020:10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan paspor merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Keimigrasian yang memiliki cakupan pada bidang pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta berperan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Suryawan, 2020:59). Sebagai salah satu bentuk tugas dan fungsi pada bidang pelayanan publik, proses pelayanan paspor memiliki dinamika kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat.

Salah satu poin kebijakan yang berlaku pada bidang pelayanan paspor adalah berkaitan dengan penerapan PNPB Paspor yang senantiasa berubah menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku pada saat kebijakan tersebut diterapkan. Dalam kajian terhadap kebijakan penerapan PNPB Paspor saat ini, perlu diketahui bahwa penerapan PNPB Paspor yang berlaku saat ini merupakan penyesuaian terhadap peraturan yang telah berlaku terdahulu. Apabila meruntut kepada kebijakan penerapan paspor terdahulu yang masih berlaku pada saat ini, maka perlu dikategorisasikan kebijakan penerapan PNPB Paspor tersebut dalam beberapa kategorisasi sesuai dengan karakteristik yang dapat dibedakan dalam formulasi kebijakan masing-masing peraturan yang ada, diantaranya adalah berdasarkan jenis paspor, jumlah halaman paspor dan masa berlaku paspor.

Pada kategori jenis paspor, Indonesia mulai menerapkan paspor elektronik pada tahun 2010 sehingga jenis paspor yang berlaku di Indonesia saat ini terbagi atas 2 jenis yaitu paspor biasa non-elektronik (selanjutnya ditulis sebagai paspor biasa) dan paspor biasa elektronik (selanjutnya ditulis sebagai paspor elektronik). Apabila kategorisasi dibagi berdasarkan jumlah halaman paspor, maka terdapat 2 jenis paspor yang terkategori berdasarkan jumlah halamannya, yaitu paspor 24 halaman dan paspor 48 halaman. Pembagian masa berlaku paspor juga berpengaruh terhadap kategorisasi kebijakan pelayanan paspor karena saat ini paspor juga memiliki masa berlaku yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan paspor dengan masa berlaku 10 tahun.

Kategorisasi jenis paspor tersebut diperlukan dalam proses formulasi kebijakan penerapan PNPB dalam pelayanan paspor karena dinamika perubahan kebijakan yang dituangkan dalam PP yang mengatur terkait dengan penerapan PNPB dalam pelayanan paspor memiliki acuan berdasarkan kategorisasi paspor yang ada. Pengaturan penerapan PNPB Paspor berdasarkan kategorisasi yang tersedia setidaknya terbagi dalam 6 PP yang telah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu PP Nomor 38 Tahun 2009, PP Nomor 45 Tahun 2014, PP Nomor 10 Tahun 2015, PP Nomor 45 Tahun 2016, PP Nomor 28 Tahun 2019 dan PP Nomor 45 Tahun 2024.

Tabel 2. Perbandingan Kebijakan Penerapan PNBP Paspor Berdasarkan Kategorisasi yang Terdapat dalam Peraturan Pemerintah (dalam rupiah)

	Kategorisasi Peraturan Pemerintah				
	PP 38/2009	PP 45/2014	PP 10/2015	PP 45/2016	PP 28/2019
Paspor Biasa 24 Hlm.	50.000	100.000	100.000	100.000	-
Paspor Elektronik 24 Hlm.	350.000	350.000	350.000	350.000	-
Paspor Biasa 48 Hlm.	200.000	300.000	300.000	300.000	350.000
Paspor Elektronik 48 Hlm.	600.000	600.000	600.000	600.000	650.000
Biaya Jasa Biometrik	55.000	55.000	-	-	-

Sumber: Peraturan Pemerintah PNBK Kemenkumham diolah oleh penulis, 2024

Apabila dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku pada PP Nomor 45 Tahun 2024, maka kebijakan penerapan PNBK Paspor memberikan tambahan kategorisasi kembali yaitu masa berlaku paspor. Dalam kebijakan PNBK Paspor yang berlaku pada PP Nomor 38 Tahun 2009 hingga PP Nomor 28 Tahun 2019, seluruh kategori paspor memiliki masa berlaku yang seragam, yaitu 5 tahun. Sedangkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2024, terdapat kategorisasi penerapan PNBK Paspor berdasarkan masa berlaku paspor yang terbagi dalam dua kategori, yaitu paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan paspor dengan masa berlaku 10 tahun.

Tabel 3. Kebijakan Penerapan PNBK Paspor Berdasarkan Kategorisasi yang Terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2024 (dalam rupiah)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Tarif
Paspor Biasa 48 Halaman (masa berlaku 5 Tahun)	350.000
Paspor Elektronik 48 Halaman (masa berlaku 5 Tahun)	650.000
Paspor Biasa 48 Halaman (masa berlaku 10 Tahun)	650.000
Paspor Elektronik 48 Halaman (masa berlaku 10 Tahun)	950.000

Sumber: PP Nomor 45 Tahun 2024, diolah oleh penulis, 2024

Adanya penambahan kategorisasi yang terdapat dalam formulasi kebijakan penerapan PNBK Paspor pada PP Nomor 45 Tahun 2024 dipengaruhi oleh kebijakan mengenai Paspor yang telah terbit lebih dulu yaitu PP Nomor 51 Tahun 2020 dengan detail yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022 memiliki beberapa poin perubahan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan pelayanan paspor di Indonesia. Poin-poin tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Poin-Poin Perubahan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022

No.	Pasal	Poin Perubahan
1.	2 ayat (3)	Paspor biasa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dengan lembar laminasi; dan b. Paspor biasa elektronik dengan lembar polikarbonat.
2.	2A	(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; (2) Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah; (3) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya; (4) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	4 ayat (2&3)	Dihapus
Perubahan lain terkait teknis pelayanan paspor terdapat pada pasal 5A, pasal 5 huruf g, pasal 6, pasal 8 huruf b, c & d, pasal 10, pasal 14, pasal 20, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 28, pasal 29A, pasal 41, pasal 41A, pasal 41B, pasal 61, pasal 61A, pasal 61B, pasal 61C, pasal 61D, pasal 61E, pasal 61F, pasal 61G, pasal 61H, pasal 61I dan pasal 61J.		

Sumber: Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, diolah oleh penulis, 2024

Perubahan kebijakan pelayanan paspor pasca berlakunya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 memberikan dampak yang berkesinambungan termasuk pada kebijakan penerapan PNBK Paspor. Hal ini dikarenakan pada saat Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 dilaksanakan, belum terdapat peraturan pelaksana atau kebijakan yang mengatur terkait dengan perubahan PNBK Paspor. Padahal pasca diterapkannya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tersebut, secara langsung mengubah kebijakan layanan paspor dengan pemberian masa berlaku paspor 10 tahun bagi pemohon paspor yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta pemberian masa berlaku paspor 5 tahun bagi pemohon paspor yang berusia dibawah 17 tahun. Kebijakan ini juga menambahkan klausa bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda diberikan masa berlaku paspor hingga batasan usia memilih kewarganegaraannya.

Kompleksitas kebijakan pelayanan paspor menjadi semakin rumit karena tidak adanya perubahan kebijakan penerapan PNPB Paspor pasca berlakunya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 hingga kemudian terbit PP Nomor 45 Tahun 2024. Kerumitan pelaksanaan pelayanan paspor tergambarkan dari banyaknya pemohon paspor yang mempertanyakan perbedaan kategori paspor hanya berdasarkan pemberian masa berlaku paspor yang tidak bersifat opsional dan tanpa disertai perbedaan berdasarkan pembayaran PNPB Paspor yang harus dibayarkan untuk mendapatkan masa berlaku paspor yang berbeda.

Dalam sebuah studi kasus pada permohonan paspor yang diajukan oleh satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan 2 orang anak yang belum berusia 17 tahun, apabila mereka berempat mengajukan permohonan paspor dengan jenis paspor yang sama (baik paspor biasa maupun paspor elektronik), maka permohonan dari keempat pemohon paspor tersebut akan membayar biaya PNPB Paspor yang sama sesuai dengan jenis paspor yang dipilih (350 ribu rupiah untuk paspor biasa atau 650 ribu rupiah untuk paspor elektronik). Permasalahan yang kemudian muncul adalah secara otomatis, pemohon yang telah berstatus dewasa (ayah dan ibu) akan mendapatkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun, sedangkan bagi 2 pemohon yang berstatus sebagai anak dengan usia dibawah 17 tahun akan mendapatkan paspor dengan masa berlaku 5 tahun saja. Padahal keseluruhan permohonan paspor tersebut membayar PNPB Paspor dengan jumlah yang sama, namun tidak mendapatkan masa berlaku yang sama pada akhirnya.

Hal ini yang kemudian menjadi kekurangan dalam penerapan kebijakan layanan paspor berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Kekurangan ini pada dasarnya telah coba dianalisis oleh penulis sejak awal formulasi kebijakan penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang mulai digaungkan, terutama sejak terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2020 yang berstatus sebagai Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada tahun 2021, penulis telah berupaya menganalisis mengenai kebijakan penyesuaian penerimaan negara atau PNPB Paspor dengan mempertimbangkan kategorisasi jenis paspor berdasarkan beberapa kategori, yaitu jenis paspor, jumlah halaman paspor dan masa berlaku paspor yang nantinya akan berpengaruh pada besaran PNPB yang diberikan untuk pilihan kategori paspor tersebut.

Pada upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun yang sedang dijalankan pada saat itu, setidaknya dapat mempertimbangkan pilihan tiga jenis paspor yang dapat diterbitkan, yaitu paspor biasa 24 halaman yang memiliki tarif PNPB 200 ribu rupiah, paspor biasa 48 halaman yang memiliki tarif PNPB 350 ribu rupiah dan paspor elektronik yang memiliki tarif PNPB 650 ribu rupiah. Kategorisasi yang kemudian dapat dilakukan adalah dengan memberikan masing-masing jenis paspor tersebut perbedaan pilihan pada masa berlaku 5 dan 10 tahun serta apabila memungkinkan dapat ditambah pilihan jumlah halaman paspor menjadi 96 halaman. Penambahan pilihan jumlah halaman memiliki pertimbangan bahwa dengan semakin lamanya masa berlaku paspor yang diberikan, maka akan memiliki potensi penggunaan paspor yang lebih tinggi intensitasnya sehingga perlu direncanakan untuk penambahan pilihan jumlah halaman untuk mengantisipasi permasalahan halaman paspor yang penuh namun masa berlaku paspornya masih tersisa lama.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan, mempertimbangkan untuk memberikan pilihan tarif PNPB yang bervariasi menyesuaikan dengan pilihan kategorisasi paspor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor. Pertimbangan pilihan yang dapat diberikan kepada pemohon setidaknya adalah sebagai berikut: (Edwinarta, 2022:146)

- a. Memberikan pilihan paspor satu jenis, yaitu Paspor Elektronik 96 halaman dengan masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.
- b. Memberikan pilihan paspor dua jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 500 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1 juta rupiah.
- c. Memberikan pilihan paspor dua jenis, yaitu Paspor Biasa 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 700 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.
- d. Memberikan pilihan paspor empat jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 350 ribu rupiah, Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 650 ribu rupiah, Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 500 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1 juta rupiah.
- e. Memberikan pilihan paspor empat jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 350 ribu rupiah, Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 650 ribu rupiah, Paspor Biasa 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 700 ribu rupiah, dan Paspor Elektronik 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.

Pertimbangan kategorisasi pilihan paspor tersebut diformulasikan untuk menyesuaikan aspek-aspek yang perlu disesuaikan untuk menyelaraskan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dengan jenis paspor dan jumlah halaman yang dapat dipilih oleh pemohon paspor pada saat pengajuan permohonan paspor nantinya. Penyesuaian kebijakan ini bersifat pilihan atau opsional untuk mempertimbangkan kemampuan pemohon paspor dan keadilan sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan yang dapat timbul sebagai dampak dari penerapan perubahan kebijakan pelayanan paspor tersebut nantinya.

Kebijakan penerapan PBNP dalam pelayanan paspor merupakan sebuah kebijakan yang memerlukan kajian mendalam terkait dengan perubahan atau penyesuaian tarif PBNP Paspor yang disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dalam proses pelayanan paspor. Dinamikan kebijakan yang berlaku dalam proses pelayanan paspor mulai berkembang secara dinamis sejak diterapkannya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari kebijakan penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang diturunkan dari PP Nomor 51 tahun 2020. Namun dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 belum mencantumkan ketentuan penyesuaian tarif PBNP terhadap pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun (yang berubah dari sebelumnya masa berlaku paspor 5 tahun) serta belum diberikannya pilihan jenis masa berlaku paspor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor (yang berkaitan juga dengan pembedaan penerapan PBNP bagi paspor dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun) sehingga menjadikan kebijakan tersebut perlu dievaluasi dan dilakukan reformulasi menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Pertimbangan untuk menyesuaikan kebijakan penerapan tarif PBNP Paspor pada dasarnya diperlukan karena dalam dinamika kebijakan pelayanan paspor saat ini juga telah diterbitkan kembali peraturan pelaksana yang mengubah alur kebijakan pelayanan paspor di Indonesia. Pengaturan tersebut berubah sejak diterbitkannya Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mencantumkan beberapa poin penting dalam perubahan kebijakan pelayanan paspor di Indonesia. Poin-poin perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Poin-Poin Perubahan Dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024

No.	Pasal	Poin Perubahan
1.	2A	(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun; b. untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun; atau c. untuk Warga Negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun. (3) Dalam kondisi tertentu untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun. (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direktur Jenderal. (5) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya; (6) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan lain terkait teknis pelayanan paspor terdapat pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 5A, pasal 7, pasal 8, pasal 9A, pasal 9B, pasal 21, pasal 36, pasal 40A, pasal 46, pasal 58, pasal 59, pasal 65. Ketentuan ini juga menghapus pasal 45, pasal 47 serta Lampiran I dan II.		

Sumber: Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, diolah oleh penulis, 2024

Kebijakan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2024 mengubah alur pelayanan permohonan paspor dari yang sebelumnya tidak memberikan pilihan bagi pemohon paspor untuk dapat menentukan pilihan masa berlaku paspornya, menjadi terdapat pilihan masa berlaku paspor meskipun pilihan tersebut bersifat tambahan berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi nantinya. Namun hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, lampiran keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan pelayanan paspor berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 belum diterbitkan atau disosialisasikan lebih lanjut. Bahkan ketika PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang PBNP Kemenkumham diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024, belum ada

tindak lanjut kembali berkaitan dengan pelaksanaan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 maupun penerbitan kembali peraturan terbaru yang menyesuaikan dengan PP Nomor 45 Tahun 2024.

Dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 telah dijelaskan bahwa akan terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan penerapan PNPB Paspor yang mulai akan berlaku setelah 60 (enam puluh) hari pasca PP tersebut diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan *campaign brief* yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi berkaitan dengan perubahan tarif PNPB Paspor.

Gambar 1. Campaign Brief Perubahan Tarif PNPB Paspor



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, diolah oleh penulis, 2024

Dalam studi kasus yang terdapat pada Kantor Imigrasi Blitar, terdapat beberapa dinamika yang terjadi pasca implementasi kebijakan penerapan PNPB Paspor yang diterapkan mulai 17 Desember 2024. Dinamika tersebut berkaitan dengan perubahan jumlah permohonan paspor hingga penerimaan PNPB yang didasarkan atas kebijakan penerapan PNPB Paspor yang terbaru. Perbandingan penerbitan paspor dapat mengacu pada jumlah penerbitan paspor bulan Oktober-Desember secara *year-on-year* (YoY) periode tahun 2023 dan 2024 serta perbandingan penerbitan secara *month-on-month* (MoM) pada periode bulan Desember 2024 sebelum dan setelah kebijakan penerapan PNPB Paspor tersebut diterapkan sejak tanggal 17 Desember 2024. Kategorisasi data juga mencakup pada perbandingan jumlah PNPB yang didapatkan secara tahunan maupun bulanan sehingga dapat dianalisis signifikansi implikasi kebijakan tersebut terhadap dinamika yang terjadi dalam proses pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar.

Tabel 6. Data Perbandingan Penerbitan Paspor Bulan Oktober-Desember Tahun 2023 dan 2024

Jenis Paspor	Periode		
	Oktober-Desember 2023	Oktober- 16 Desember 2024	17-31 Desember 2024
Paspor Biasa 5 th	331	322	348
Paspor Biasa 10 th	7.153	4.857	268
E-Paspor 5 th	73	249	341
E-Paspor 10 th	551	2.458	264
Jumlah Penerbitan	8.108	9.107	1.221
Layanan Percepatan	158	131	1

Sumber: Kantor Imigrasi Blitar, diolah oleh penulis, 2025

Tabel 7. Data Perbandingan Penerimaan PNBP Paspor Bulan Oktober-Desember Tahun 2023 dan 2024 (dalam rupiah)

Jenis Paspor	Bulan		
	Oktober-Desember 2023	Oktober-16 Desember 2024	17-31 Desember 2024
Paspor Biasa 5 th	115.850.000	112.700.000	121.800.000
Paspor Biasa 10 th	2.503.550.000	1.699.950.000	174.200.000
E-Paspor 5 th	47.450.000	161.850.000	221.650.000
E-Paspor 10 th	192.850.000	1.597.700.000	250.800.000
Layanan Percepatan	158.000.000	131.000.000	1.000.000
Total PNBP	3.017.700.000	3.703.200.000	769.450.000

Sumber: Kantor Imigrasi Blitar, diolah oleh penulis, 2025

Perbandingan permohonan paspor direkapitulasi per bulan Oktober-Desember memiliki pertimbangan bahwa kebijakan penerapan PNBP baru diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan baru berlaku 60 hari setelahnya atau pada 17 Desember 2024. Data yang diambil pada studi kasus di Kantor Imigrasi Blitar menyatakan bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam pengajuan permohonan paspor biasa non-elektronik maupun paspor biasa elektronik dengan masa berlaku 5 tahun. Dalam periode Oktober hingga 16 Desember 2024, terdapat 322 permohonan paspor biasa non-elektronik 5 tahun yang artinya memiliki rata-rata 107 permohonan tiap bulannya. Namun dalam periode 17-31 Desember 2024 setelah kebijakan penerapan PNBP Paspor yang baru diterapkan, terdapat 348 permohonan yang diajukan atau mengalami kenaikan permohonan sejumlah 30,75 persen. Jika ditarik data penerimaan PNBP, juga terdapat kenaikan sebesar 30,84 persen apabila diperbandingkan secara rata-rata bulanan (*month-to-month*).

Secara tahunan (*year-on-year*), perbandingan kenaikan jumlah permohonan adalah sebesar 27,38 persen dan peningkatan PNBP sebesar 48,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan PNBP Paspor dapat dikatakan berhasil apabila ditujukan untuk meningkatkan jumlah permohonan maupun PNBP yang diperoleh oleh Kantor Imigrasi. Namun pada sisi lainnya, kebijakan penerapan PNBP Paspor masih memiliki kekurangan terutama dalam hal penyusunan atau formulasi kebijakan yang belum menyeluruh kepada proses pelayanan paspor yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam analisis berkaitan dengan perubahan kebijakan penerapan tarif PNBP yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2024, terdapat beberapa kekurangan kembali yang perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memformulasikan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan pelayanan paspor nantinya. Kekurangan tersebut terdapat pada belum adanya pencantuman tarif PNBP bagi jenis Paspor biasa Elektronik dengan lembar Polikarbonat (selanjutnya ditulis sebagai Paspor Elektronik Polikarbonat) yang sudah digaungkan keberadaannya pada Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022.

Untuk saat ini memang belum banyak Kantor Imigrasi yang dapat menerbitkan Paspor Elektronik Polikarbonat karena baru diujicobakan di Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Namun pasca Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan adanya desain baru Paspor Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang lalu, penyesuaian kebijakan penerapan tarif PNBP bagi Paspor Elektronik Polikarbonat tentu menjadi hal yang menjadi perhatian masyarakat. Terlebih setelah Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh Pada Kantor Imigrasi di Seluruh Wilayah Indonesia pada 11 November 2024 yang menyatakan bahwa nantinya seluruh Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia hanya akan menerbitkan jenis Paspor Elektronik melalui kebijakan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh Kantor Imigrasi pada tanggal 1 November 2025.

Penjabaran atas kebijakan-kebijakan di atas dapat menjadi *input* utama dalam konsep reformulasi kebijakan yang terdapat dalam kebijakan penerapan PNBP Paspor. Hal ini kemudian memerlukan penelaahan secara konseptual sehingga dihasilkan sebuah kebijakan publik yang mumpuni. Penyusunan kebijakan publik memerlukan beberapa langkah dalam proses analisis kebijakan sehingga dapat dihasilkan sebuah kebijakan yang tepat dan sesuai. Tahapan tersebut terdiri atas tujuh proses analisis kebijakan, yaitu Tahapan Pengkajian Persoalan, Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Penyusunan Model, Perumusan Alternatif Kebijakan, Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan, Penilaian Alternatif Kebijakan, serta Perumusan Rekomendasi Kebijakan (Widodo, 2021:70-76).

Pada Tahapan Pengkajian Persoalan berupaya untuk menemukan dan memahami hakikat permasalahan melalui proses identifikasi permasalahan yang diperlukan dalam proses formulasi kebijakan. Dalam Tahapan Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, dipahami sebagai upaya perumusan hal yang ingin dicapai dan

upaya intervensi yang perlu dilakukan sebagai alternatif dalam proses perumusan kebijakan. Tahapan Penyusunan Model merupakan bentuk tindakan analisis untuk menentukan alternatif kebijakan yang dapat dipilih nantinya. Hal ini kemudian berlanjut pada Tahapan Perumusan Alternatif Kebijakan yang merupakan upaya pencapaian tujuan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang disusun berdasarkan atas Tahapan Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan. Tahapan Penilaian Alternatif Kebijakan merupakan penentuan parameter atau kriteria terhadap langkah intervensi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan. Seluruh tahapan ini kemudian bermuara kepada Perumusan Rekomendasi Kebijakan yang merupakan alternatif dengan penilaian tertinggi sehingga dapat direkomendasikan menjadi sebuah kebijakan (Widodo, 2021:70-76).

Dalam kajian terhadap kebijakan penerapan PNPB Paspor setidaknya diperlukan beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Pertama adalah perlu adanya perumusan aspek-aspek kunci yang berpengaruh terhadap kebijakan penerapan PNPB Paspor menyesuaikan dengan kebijakan yang telah berlaku dalam proses pelayanan paspor sebelumnya. Kemudian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagai pengguna dari layanan paspor untuk dapat menghasilkan pertimbangan pilihan apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam proses pengajuan permohonan paspor nantinya. Terakhir, Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu menyesuaikan kebijakan penerapan PNPB Paspor dengan kebijakan yang berlaku pada instansi atau lembaga lain, seperti misalnya penyesuaian tarif PNPB bagi pemohon paspor yang tinggal di luar negeri atau pemohon paspor yang merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki keterbatasan dalam aspek pemilihan masa berlaku paspor yang terbatas hingga batasan usia memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

KESIMPULAN

Dinamika kebijakan penerapan PNPB Paspor merupakan sebuah analisis terhadap proses implementasi kebijakan yang memiliki kompleksitas dalam setiap tahapannya. Hal ini dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan terhadap banyak aspek yang perlu diakomodir dalam kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih peraturan dan inkonsistensi kebijakan yang juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan lain yang terdapat pada instansi atau lembaga lain nantinya.

Proses reformulasi kebijakan yang telah berlangsung sejak diterapkannya PP Nomor 38 Tahun 2009, PP Nomor 45 Tahun 2014, PP Nomor 10 Tahun 2015, PP Nomor 45 Tahun 2016, PP Nomor 28 Tahun 2019 dan PP Nomor 45 Tahun 2024 seharusnya mampu mengakomodir segenap kepentingan yang menjadi tujuan dari dinamika kebijakan penerapan PNPB dalam pelayanan paspor di Indonesia. Perlu menjadi catatan bahwa dalam perubahan kebijakan penerapan PNPB pelayanan paspor di Indonesia memiliki kendala terhadap penyelarasan dengan kebijakan lain yang selayaknya berjalan seiringan dengan perubahan kebijakan yang ada, seperti perubahan kebijakan dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang kemudian diubah kembali menjadi Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024.

Dalam aspek kategorisasi pemilihan jenis paspor yang dapat diberikan kepada masyarakat misalnya, apabila menganalisis dinamika kebijakan pelayanan paspor yang berlaku saat ini, perlu dikaji ulang perihal kategorisasi penerapan PNPB dalam proses pelayanan paspor di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2024, perlu ditambahkan kembali terkait dengan kategorisasi penerapan tarif PNPB bagi jenis Paspor Elektronik Polikarbonat yang belum tercantum dalam PP tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga penghapusan pilihan tarif PNPB bagi pilihan jenis Paspor Biasa non-elektronik pasca penerapan penuh kebijakan Paspor Elektronik pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia yang ditargetkan akan menerbitkan Paspor Elektronik sepenuhnya pada 1 November 2025.

Hal lain yang juga penting untuk menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan penerapan PNPB Paspor adalah berkaitan dengan pengaturan kesisteman dalam aplikasi M-Paspor maupun Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang diterapkan oleh seluruh Kantor Imigrasi untuk dapat mengakomodir beberapa ketentuan yang terdapat pada peraturan-peraturan mengenai pelayanan paspor yang berhubungan dengan kebijakan penerapan PNPB Paspor juga nantinya. Ketentuan tersebut adalah mengenai penerapan masa berlaku paspor bagi WNI dengan kondisi tertentu yang disebutkan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, serta pengakomodasian kebijakan afirmatif bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang akan mengajukan permohonan paspor dengan tanpa mengesampingkan kebijakan pembatasan

penerapan masa berlaku paspor sesuai dengan batasan usia memilih kewarganegaraannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Diharapkan dengan adanya proses formulasi kebijakan yang mempertimbangkan beberapa aspek pendukung dalam proses pelayanan paspor tersebut dapat menghasilkan kebijakan penerapan PNPB Paspor yang berkeadilan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalkan potensi munculnya permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan penerapan kebijakan penerapan PNPB Paspor apabila nantinya telah ditetapkan dan diterapkan pada Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana kebijakan Keimigrasian nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
2. Agustino, Leo. 2023. *Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis Dan Praktis*. Malang: Intrans Publishing.
3. Amrullah, M. Kholis dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
4. Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
5. Darmalaksana, M. 2020. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
6. Edwinarta, Caesar Demas. 2024. *Imigrasi Dan Pandemi: Rangkuman Analisis Kebijakan Pelayanan Paspor Di Indonesia Pasca Pandemi Beserta Studi Kasusnya*. Surabaya: Pustaka Aksara.
7. Edwinarta, Caesar Demas & Marlina Eka Fauzia. 2022. "Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 8(1).
8. Harrison, Lisa. 2016. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
9. Katharina, Riris. 2020. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. ed. Riris Katharina. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
10. Kurniawan, Luthfi J. & Mustafa Lutfi. 2017. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
11. Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
12. Romadlon, Suryo Gilang. 2023. *Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda*. Depok: Rajagrafindo Persada.
13. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
14. Suryawan, Ryan Firdiansyah & Primadi Candra Susanto. 2020. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina Edisi 3*. 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
15. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.
16. Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Studi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Timur

Evita Dianasukma¹, Hasti Aringga Suminar²

Bakorwil Provinsi Jawa Timur di Jember, Jember, Indonesia¹
 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember, Jember, Indonesia²
dianasukmaevita@gmail.com

Abstract

The tourism industry is one of the key areas of focus for the government, given Indonesia's natural beauty spread across its regions and its rich, well-preserved cultural diversity. This study aims to examine the influence of the tourism sector on economic growth in East Java. The research employs panel data regression using cross-sectional data from 20 regencies/municipalities in East Java Province and time-series data from 2017 to 2022. The findings reveal that tourism revenue and investment have a positive and significant impact on the Gross Regional Domestic Product (GRDP). Moreover, the number of international tourist arrivals and hotel accommodations also significantly affect East Java's GRDP. Strategic planning for the sustainability of the tourism sector involves institutional and managerial strengthening, market attractiveness and product promotion, investment enhancement, cultural and environmental stewardship, and regional economic development. The recommended strategy includes well-organized institutional management through enhanced hexahelix collaboration (business, government, community, academia, media, and professional organizations), regional economic development through infrastructure and facilities improvement, and cultural and environmental stewardship that ensures the protection of local socio-cultural values and natural tourism assets. Furthermore, boosting market attractiveness and product promotion is expected to stimulate regional MSMEs, thereby driving local economic growth in tourism destinations.

Keywords: tourism; tourism revenue; gross regional domestic product; investment.

Abstrak

Industri pariwisata menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah mengingat Indonesia yang memiliki keindahan alam di setiap bagian wilayahnya dan beragam budaya yang tetap asri. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi data panel dengan *cross section* 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan *time series* tahun 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pariwisata dan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan jumlah akomodasi hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Perencanaan strategis dalam keberlanjutan sektor pariwisata yaitu kelembagaan dan manajemen, *market attractiveness and pushing product*, peningkatan investasi, *cultural and enviromental*

INFORMASI ARTIKEL

Naskah diterima: 27/03/2025
 Revisi: 06/05/2025
 Diterima untuk dipublikasi: 08/05/2025

doi: -

© 2025 Jurnal Pradah

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH
 Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah, Penelitian dan
 Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar,
 Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40,
 Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117
 Telepon: (0342) 808165
 Fax: (0342) 806275
 E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

stewardship, dan pembangunan ekonomi daerah. Rekomendasi strategi yang disarankan yaitu manajemen kelembagaan yang terorganisir dengan meningkatkan peran kolaborasi *hexahelix* (*business, government, community, academic, media, dan professional organizations*), pembangunan ekonomi daerah yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana *cultural and environmental stewardship* yang berkaitan dengan perlindungan sosial budaya dan lingkungan tempat wisata agar tetap asri. Selain itu juga *market attractiveness and pushing product* yang menggerakkan sektor UMKM regional yang mendorong perekonomian masyarakat daerah wisata.

Kata Kunci: pariwisata; pendapatan pariwisata; produk domestik regional bruto; investasi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dari sektor pembangunan, seperti sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, sektor pariwisata, dan lain sebagainya (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022). Sektor pariwisata yang menjadi topik penelitian ini, merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam perhitungan produk domestik regional bruto. Dengan demikian, perkembangan sektor pariwisata secara tidak langsung memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi regional. Industri pariwisata menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah mengingat Indonesia yang memiliki keindahan alam di setiap bagian wilayahnya dan beragam budaya yang tetap asri (Hermawati et al., 2020; Kumala et al., 2017). Faktor tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan alam Indonesia dan wadah pengembangan wawasan serta objek penelitian bagi pada peneliti domestik maupun mancanegara. Pengembangan pariwisata dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi destinasi dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal (Anyu Liu, 2022; Salifou & Haq, 2017). Namun, produk pariwisata yang substansial diimpor dari negara lain, seperti fasilitas di hotel dan restoran di industri tersebut. Meskipun demikian, banyak produk yang diekspor sebagai perantara produk wisata, seperti bahan makanan dan kerajinan.

Para peneliti meyakini bahwa prospek pariwisata memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mengembangkan UMKM, menarik investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengaktifkan sektor produksi lainnya di daerah tujuan wisata (Indriana, 2022; Pérez-Rodríguez et al., 2022). Peluang tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian lingkungan. Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sebagian urusan di bidang pariwisata. Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dan juga pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut memungkinkan bagi daerah untuk mengeksplor dan mengelola sumber daya alam dan budaya yang dimiliki daerah guna mendorong ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah otonom yang memiliki kewajiban untuk mengelola kekayaan alam dengan melibatkan pemangku kepentingan, masyarakat umum, dan juga para akademisi. Berdasarkan data pergerakan *Mobile Positioning Data* (MPD) wisatawan Nusantara yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat pergerakan wisatawan nusantara sejumlah 182.110.988 pengunjung datang ke Provinsi Jawa Timur. Perjalanan wisata ke Provinsi Jawa Timur didominasi oleh penduduk lokal. Dari total perjalanan MPD 86,9% berasal dari perjalanan antar kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan 13,1% berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. (Sumber: BPS Tahun 2023 diolah). Kondisi sarana prasarana infrastruktur transportasi dan aksesibilitas wisatawan di Jawa Timur sangat mendukung yakni dengan adanya 6 (enam) bandar udara komersial, 23 (dua puluh tiga) pelabuhan kapal laut, 121 (serratus dua puluh satu) stasiun kereta api yang tersebar pada Daerah Operasi (Daop) tujuh Madiun, Daop delapan Surabaya, dan Daop Sembilan Jember, serta Provinsi Jawa Timur dilalui oleh Tol Trans Jawa yang melintas dari Kabupaten Ngawi hingga Kabupaten Probolinggo, terdapat pula Jalur Lintas Selatan yang melintasi Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi global juga memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan sektor pariwisata karena berkaitan dengan aturan yang diterapkan di negara maupun akibat pandemi, seperti pandemi Covid-19 yang membatasi jumlah wisatawan masuk Indonesia. Dengan demikian pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata perlu merancang rencana pemulihan dan menghindari dampak yang lebih besar dari potensi memburuknya pandemi. Sektor pariwisata sangat bergantung pada mobilitas internasional dan krisis ekonomi, sehingga menjadi penting untuk memahami apakah dampak guncangan terhadap pariwisata bersifat permanen atau sementara, dan untuk memodelkan hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dengan tepat (Anyu Liu, 2022; Yoga Asmoro et al., 2021). Pariwisata di Jawa Timur terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan berbagai destinasi wisata alam yang menarik, seperti pantai-pantai di Malang Selatan, Gili Labak dan Gili Iyang di Pulau Madura, serta kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang menjadi salah satu ikon pariwisata nasional. Kehadiran destinasi-destinasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga mendorong berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar area wisata. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki berbagai objek wisata tematik, seperti taman rekreasi, yang mencakup Taman Safari Pasuruan, Jatim Park Batu, dan Wisata Bahari Lamongan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022; Subardini, 2017). Selain kekayaan alamnya, Jawa Timur juga memiliki beberapa kota wisata yang menarik, seperti Kota Malang dan Kota Batu. Kabupaten Banyuwangi, dengan slogan pariwisatanya "*Sunrise of Java*", terus berinovasi dalam mengembangkan destinasi wisatanya. Provinsi Jawa Timur juga dikenal dengan berbagai festival tahunan yang unik dan menarik, serta memiliki beragam kuliner khas yang lezat dan menggugah selera. Semua ini membuat Jawa Timur menjadi tujuan wisata yang sangat menarik bagi pelancong. Berbagai peluang dan ancaman muncul dalam pengelolaan industri pariwisata sehingga perlu mengidentifikasi faktor-faktor industri pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kebaruan penelitian ini adalah pada tahun penelitian dan spesifikasi model penelitian yang mempertimbangkan variabel investasi sektor pariwisata dan pandemi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross-section*. Penaksiran atau estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Selanjutnya, terdapat tiga jenis uji khusus yang digunakan untuk memilih model regresi data panel yang terbaik untuk suatu permasalahan yang ada, yaitu *uji chow*, *uji hausman*, dan *uji lagrange multiplier*. *Uji chow* digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan *common effect model* dengan model yang diperoleh dengan pendekatan *fixed effect model*. *Uji hausman* ini digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan *random effect model* dengan model yang diperoleh dengan pendekatan *fixed effect model*. *Uji lagrange multiplier* digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan *random effect model* dengan model yang diperoleh dengan pendekatan *common effect model*.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh dari sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Sumber data penelitian yaitu Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data *time series* yaitu tahun 2017-2022 dan data *cross section* yaitu 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 20 kabupaten/kota yang terpilih tersebut memiliki jumlah akomodasi hotel terbanyak pada tahun 2021. Spesifikasi model penelitian ini menggunakan transformasi data menjadi skala logaritma dengan tujuan untuk memenuhi asumsi analisis, yaitu sebagai berikut:

$$\log PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PP_{it} + \beta_2 \log TOUR_{it} + \beta_3 \log INV_{it} + \beta_4 \log AKM_{it} + e_i \quad (1)$$

Keterangan:

- PDRB : Produk Domestik Regional bruto Jawa Timur atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (dalam Milyar Rupiah)
- PP : Pendapatan sektor pariwisata yaitu pendapatan dari Perdagangan Besar dan Eceran; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; *Real Estate* (dalam juta rupiah)
- Tour : jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (jumlah)

Inv : Investasi sektor pariwisata yaitu terdiri dari realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar negeri (dalam milyar rupiah)

AKM : Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel (unit)

e : error term

it : *cross section* dan *time series*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang pertama terkait uji statistik deskriptif yaitu bertujuan mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam suatu penelitian. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai maksimum 88075446 yang merupakan PDRB Kabupaten Jember tahun 2022 dan nilai minimum 9660 yang merupakan PDRB Kota Probolinggo tahun 2017. Nilai maksimum variabel TOUR 32052900 yang merupakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batu tahun 2018, sedangkan nilai minimum 69100 merupakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batu tahun 2021.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PDRB	TOUR	PP	INV	AKM
Mean	830234.5	15248417	28697404	51287.35	176.6750
Median	44133.48	15584600	11314254	50506.30	73.00000
Maximum	88075446	32052900	3.41E+08	68489.90	1354.000
Minimum	9660.000	69100.00	3126903.	34666.50	14.00000
Std. Dev.	8066488.	12268269	62821893	10562.47	257.5484

Variabel PP memiliki nilai maksimum 3.41E+08 yang merupakan pendapatan pariwisata Kota Surabaya tahun 2022 dan nilai minimum 3126903 yang merupakan pendapatan pariwisata Kabupaten Trenggalek tahun 2017. Nilai maksimum variabel INV yaitu 68489 yang merupakan jumlah realisasi investasi di Kota Batu tahun 2022, sedangkan nilai minimum 34666 merupakan jumlah realisasi investasi di Kota Batu tahun 2018. Nilai maksimum variabel AKM yaitu 1354 yang merupakan akomodasi menurut klasifikasi hotel di Kota Batu tahun 2019, sedangkan nilai minimum 14 merupakan jumlah Akomodasi di Kabupaten Trenggalek tahun 2017. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel yang memiliki persebaran data baik yaitu TOUR dan INV yang dibuktikan dengan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, sedangkan variabel PDRB, PP dan AKM memiliki nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai rata-ratanya yang berarti memiliki persebaran data yang tidak baik.

Hasil Uji Estimasi Data Panel

Hasil estimasi *common effect model* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa PP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika pendapatan sektor pariwisata di Jawa Timur semakin tinggi maka akan mendorong PDRB Jawa Timur. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas < alpha 0.05. Selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur dan realisasi investasi berdampak positif terhadap PDRB Jawa Timur namun tidak signifikan yaitu dibuktikan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas > alpha 0.05. Jumlah akomodasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Timur yang berarti semakin banyak jumlah akomodasi dapat mengurangi PDRB. Hal ini dapat terjadi ketika jumlah akomodasi yang bertambah tidak bekerja secara produktif.

Tabel 2. Hasil Uji Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPP	0.957219	0.067375	14.20726	0.0000
LOGTOUR	0.022257	0.036601	0.608112	0.5443
LOGINV	0.544805	0.370333	1.471119	0.1440
LOGAKM	-0.049878	0.066069	-0.754934	0.4518
C	-10.76411	4.386968	-2.453655	0.0157
R-squared	0.661902	F-statistic		55.79509
Adjusted R-squared	0.650039	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil estimasi *fixed effect model* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa PP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB dibuktikan dengan nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas < alpha 0.05. Hal ini

mengindikasikan bahwa ketika pendapatan sektor pariwisata di Jawa Timur semakin tinggi maka akan mendorong PDRB Jawa Timur. Selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur dan realisasi investasi berdampak positif terhadap PDRB Jawa Timur namun tidak signifikan dibuktikan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas $> \alpha 0.05$. Jumlah akomodasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Timur yang berarti semakin banyak jumlah akomodasi dapat mengurangi PDRB.

Tabel 3. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPP	1.646719	0.710653	2.317191	0.0226
LOGTOUR	0.022191	0.030898	0.718205	0.4744
LOGINV	0.390289	0.374203	1.042988	0.2996
LOGAKM	-0.150525	0.257248	-0.585137	0.5598
C	-19.88631	10.14290	-1.960613	0.0529
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.803649	F-statistic		16.90559
Adjusted R-squared	0.756112	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil estimasi *random effect model* pada Tabel 4 menunjukkan bahwa PP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB yang berarti pendapatan sektor pariwisata di Jawa Timur semakin tinggi maka akan mendorong PDRB Jawa Timur. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas $< \alpha 0.05$. Selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur berdampak positif terhadap PDRB Jawa Timur namun tidak signifikan yaitu dibuktikan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas $> \alpha 0.05$. Jumlah akomodasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Timur yang berarti semakin banyak jumlah akomodasi dapat mengurangi PDRB. Hal ini dapat terjadi ketika jumlah akomodasi yang bertambah tidak bekerja secara produktif. Realisasi investasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur dengan tingkat probabilitas kurang dari $\alpha 0.10$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi realisasi investasi di Jawa Timur maka mendorong pertumbuhan ekonomi regional karena juga didukung dengan realisasi investasi yang bersifat produktif.

Tabel 4. Hasil Uji *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPP	0.974363	0.113590	8.577887	0.0000
LOGTOUR	0.022135	0.030603	0.723293	0.4710
LOGINV	0.547195	0.311520	1.756535	0.0817
LOGAKM	-0.065303	0.105670	-0.617991	0.5378
C	-10.99827	3.890545	-2.826924	0.0056
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.460915	0.3491
Idiosyncratic random			0.629387	0.6509
Weighted Statistics				
R-squared	0.430770	F-statistic		21.56761
Adjusted R-squared	0.410797	Prob(F-statistic)		0.000000

Tahap selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik di antara tiga model (CEM, FEM, dan REM) dengan *uji chow*, *hausman*, dan *Lagrange Multiplier*. Hasil *Uji Chow* pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *probabilitas F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha 0.05$, sehingga model yang sesuai dari hasil ini adalah *fixed effects*.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.609551	(19,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	64.668674	19	0.0000

Hasil uji hausman pada Tabel 6 menunjukkan hasil pemilihan model antara *fixed effect* dan *random effect* dengan hasil bahwa model terbaik adalah *random effect*. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas *Cross-section random* adalah $1.000 > 0.05$.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Hasil Uji Lagrange Multiplier pada Tabel 7 menunjukkan hasil pemilihan model antara *random effects* dan *common effects*. Hasil output menunjukkan nilai Probabilitas Breusch-Pagan (BP) sebesar 0.0000. Jika Probabilitas Breusch-Pagan (BP) lebih kecil dari α ($0.0000 < 0.05$) maka model yang tepat pada hasil Lagrange Multiplier adalah *random effects*. Berdasarkan pada uji pemilihan model terbaik, maka *Random Effects model* merupakan model terbaik dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

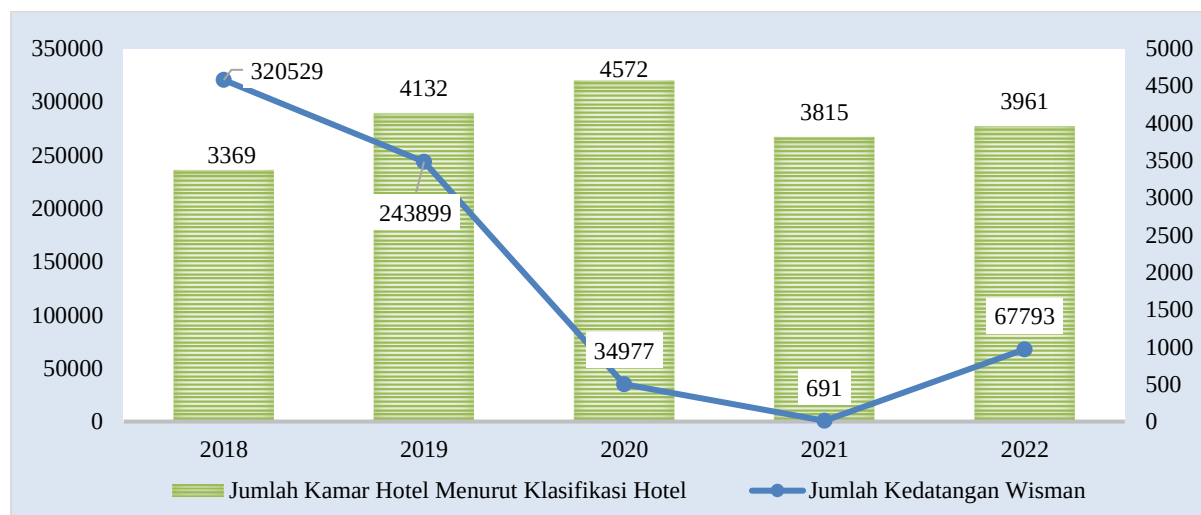
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	26.15794 (0.0000)	1.995244 (0.1578)	28.15319 (0.0000)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik yaitu *Random Effects model*, variabel pendapatan pariwisata dan realisasi investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Pendapatan pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi yaitu pendapatan dari Perdagangan Besar dan Eceran; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; *Real Estate*. Dengan demikian perencanaan pembangunan untuk keberlanjutan sektor pariwisata adalah mencakup berbagai aspek yaitu aspek lingkungan dengan meningkatkan ketersediaan air bersih untuk aktivitas produksi dan kebutuhan wisatawan.

Pengelolaan sampah dan limbah juga perlu ditingkatkan, mengingat bahwa banyak tempat wisata yang belum kuat manajemen pengelolaan sampah yang mengakibatkan banyak sampah yang berserakan selain merusak pemandangan juga dapat mencemari lingkungan tempat wisata dan secara berkelanjutan dapat mengurangi minat atau daya tarik tempat wisata. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan yaitu aktivitas ekowisata yang merupakan bentuk wisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan alami dan pengembangan masyarakat lokal. Aktivitas ini tidak hanya memungkinkan wisatawan untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga untuk mempelajari dan memahami budaya, sejarah, dan ekosistem setempat. Dengan demikian, ekowisata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan melestarikan keanekaragaman hayati di daerah yang dikunjungi.

Perencanaan pembangunan pariwisata juga melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti sarana tempat umum (toilet bersih, musholla, layanan informasi, tempat pembuangan sampah), kondisi jalan dan akses jalan yang memadai dan lain sebagainya. Infrastruktur wisata sangat penting baik untuk perekonomian, masyarakat, dan wisatawan karena mampu menarik daya minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke tempat wisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bangkit dari dampak pandemi 2019. Jumlah akomodasi berupa hotel di Jawa Timur juga mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, meskipun sempat menurun jumlahnya pada tahun 2021. Jumlah akomodasi yang tersebar di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan mampu memberikan citra yang berkesan disetiap kunjungan. Peningkatan jumlah akomodasi berupa hotel dan penginapan sejalan dengan peningkatan jumlah tempat wisata.



Gambar 1. Jumlah Kedatangan Wisata Mancanegara dan Jumlah Kamar Hotel Di Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa pada tahun 2022 daerah tujuan wisata di Jawa Timur mencapai 1.316, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 969 daerah tujuan wisata. Sebanyak 449 dari 1.361 daerah tujuan wisata di antaranya berbasis alam, 513 daerah tujuan wisata buatan, dan 354 daerah tujuan wisata berbasis budaya. Banyaknya daerah tujuan wisata di Jawa Timur ini ditunjang dengan 3.364 unit hotel, 7.889 rumah makan/restoran, 1.743 *homestay*, dan 1.792 usaha *travel agent*. Perkembangan sektor pariwisata di Jawa Timur didukung dengan adanya investasi baik investasi dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan stimulus dalam pembangunan dan pengelolaan tempat wisata. Menurut BKPM, total nilai investasi yang ditanam di Jawa Timur sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 79,5 triliun atau naik 1,53 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski tumbuh di bawah rata-rata nasional 9,0 persen, kontribusi nilai investasi Jawa Timur terhadap Nasional mencapai 11,1 persen.

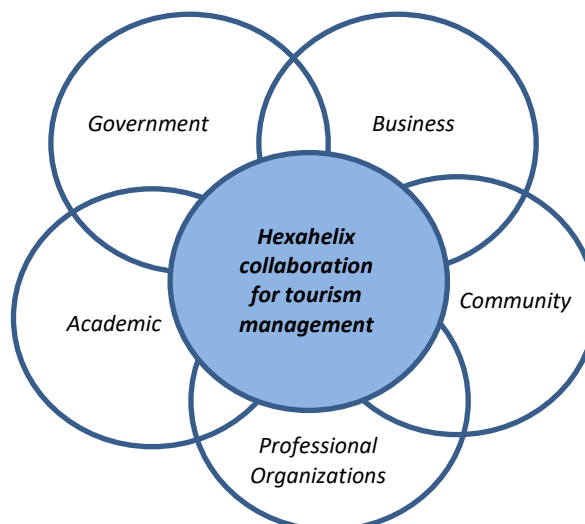
Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam perekonomian nasional. Hal ini menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya serta alam, serta memenuhi kebutuhan manusia akan pengalaman wisata yang berkualitas. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan wisata di antaranya *master plan* yang buruk, anggaran pengembangan sektor pariwisata yang minim, integrasi antara masyarakat, lembaga, dan pemerintah daerah yang kurang, pengelola pariwisata yang tidak kompeten, kualitas sumber daya manusia di daerah tujuan wisata yang masih lemah. Dengan demikian dibutuhkan implementasi kebijakan dan peraturan yang tepat dalam pengelolaan sektor pariwisata. Berikut adalah gambar rancangan strategi dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata Jawa Timur.



Gambar 2. Sustainable Development (Tourism)

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, 2024

Perencanaan pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan manajemen kelembagaan yang terstruktur dengan sumber daya yang memiliki kompetensi unggul sehingga mampu merencanakan program dan mitigasi risiko dengan baik (Haryana, 2020; UNESCO, n.d.; Widiati & Permatasari, 2022). Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, berdasarkan rencana pembangunan kepariwisataan dengan mempertimbangkan keberagaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam kelembagaan dan manajemen kepariwisataan dapat menggunakan strategi pengembangan pariwisata salah satunya yaitu melalui penerapan model *hexahelix*. Model *hexahelix* berupaya mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan meningkatkan peran *business, government, community, academic, media and professional organizations* dalam melaksanakan peran di bidang kepariwisataan.



Gambar 3. Model Hexahelix

Sumber : Sumardjo et.al, 2023

Dalam model kolaborasi *Hexahelix* dalam manajemen pariwisata melibatkan enam pihak yaitu: 1) Pemerintah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota); 2) Dunia Usaha (perusahaan pariwisata, hotel, restoran dan lain-lain); 3) Perguruan Tinggi (Universitas dan Sekolah Tinggi yang memiliki program studi pariwisata); 4) Masyarakat (komunitas lokal, kelompok sadar wisata, dan lain-lain); 5) Media (media massa, media sosial dan media online); dan 6) Organisasi Profesi (asosiasi pariwisata, asosiasi hotel, dan lain-lain). Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai hal antara lain pengembangan destinasi wisata yang berbasis pada keunikan dan kearifan lokal, pelatihan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia sektor pariwisata, pembangunan dan pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi dan pemasaran destinasi wisata Jawa Timur melalui media dan organisasi profesi, serta pengembangan program pariwisata yang berbasis pada kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Selanjutnya, pembangunan ekonomi daerah termasuk pembangunan infrastruktur tempat wisata, akses jalan, pengembangan keahlian sumber daya manusia terutama di daerah wisata dan pembangunan lain yang menunjang aktivitas pariwisata. Hal tersebut juga berkaitan dengan penganggaran dana yang lebih terencana terutama dana yang berasal dari APBD dan investasi. Penerapan penyediaan akomodasi (*supply*) yang menyesuaikan dengan permintaan (*demand*) wisatawan perlu menjadi bahan pertimbangan, karena berdasarkan hasil analisis jumlah akomodasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. *Cultural and Environmental stewardship* mengacu pada penggunaan dan perlindungan lingkungan alam dan budaya yang berkembang di tempat wisata yang bertanggung jawab melalui partisipasi aktif dalam upaya konservasi dan praktik berkelanjutan oleh individu masyarakat, swasta, wisatawan, dan pemerintah (I Nyoman Sukma Arida, n.d.; Widiati & Permatasari, 2022). Strategi selanjutnya, *Market Attractiveness and pushing product* yang berarti perencanaan pembangunan pariwisata berdasarkan preferensi dan analisis perilaku serta tarikan pasar wisatawan. Selain itu, pengembangan produk daerah dan potensi daerah yang mendorong pendapatan masyarakat tempat wisata seperti giat UMKM yang mampu memproduksi barang yang memiliki daya saing global.

KESIMPULAN

Salah satu isu strategis dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pariwisata yang sustainable dalam perekonomian nasional. Dengan demikian tujuan penelitian adalah menganalisis indikator pariwisata Jawa Timur yang terdiri dari pendapatan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, realisasi investasi Jawa Timur, dan jumlah akomodasi pariwisata terhadap pendapatan regional Jawa Timur. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pendapatan pariwisata dan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Selanjutnya, variabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Sedangkan, jumlah akomodasi hotel di Jawa Timur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor pendapatan pariwisata dan realisasi investasi menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan keberlanjutan sektor wisata. Rekomendasi strategi yang disarankan yaitu manajemen kelembagaan yang terorganisir dengan meningkatkan peran kolaborasi *hexahelix* (*business, government, community, academic, media and professional organizations*), pembangunan ekonomi daerah yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana *cultural and environmental stewardship* yang berkaitan dengan perlindungan sosial budaya dan lingkungan tempat wisata agar tetap asri. Selain itu juga *market attractiveness and pushing product* yang menggerakkan sektor UMKM regional yang mendorong perekonomian masyarakat daerah wisata.

REFERENSI

1. Anyu Liu. (2022). Impact of Tourism on Regional Economic Growth: A Global Value Chain Perspective. *ADB Economics Working Paper Series No.646, January*. <https://doi.org/10.22617/WPS220014-2>
2. Arifin, A. (2021). The Contribution of Tourism to Economic Growth: The Case of Central Java, Indonesia. *International Sustainable Competitiveness Advantage*.
3. BPS Provinsi Jawa Timur. (2022). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022*. <https://jatim.bps.go.id>
4. Haryana, A. (2020). Economic and Welfare Impacts of Indonesia's Tourism Sector. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(3), 300–311. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.127>
5. Hermawati, A., Anam, C., Suhermin, & Puji Suci, R. (2020). Efektivitas Pengembangan Sektor Pariwisata Jawa Timur Dengan Pendekatan Human Resources Strategy Dan Marketing Strategy. *Equilibrium*, 9(2), 9–25.
6. I Nyoman Sukma Arida. (n.d.). *Pariwisata Berkelanjutan*. Sustain-press. www.sobatpetualang.com
7. Indriana, D. (2022). Tourism And Economic Growth: Evidence From ASEAN Countries. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 10(2), 100–131.
8. Kumala, M., Soelistyo, A., & Nuraini, I. (2017). ANALISIS POTENSI SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 474–481.
9. Naseem, S. (2021). The role of tourism in economic growth: Empirical evidence from Saudi Arabia. *Economies*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/economies9030117>
10. Pérez-Rodríguez, J. V., Rachinger, H., & Santana-Gallego, M. (2022). Does tourism promote economic growth? A fractionally integrated heterogeneous panel data analysis. *Tourism Economics*, 28(5), 1355–1376. <https://doi.org/10.1177/1354816620980665>
11. Purnomo, S. D. (2022). The Effect Of Tourism On Economic Growth: Empirical Study In Eastern Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(08), 959–968. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
12. Salifou, C. K., & Haq, I. ul. (2017). Tourism, globalization and economic growth: a panel cointegration analysis for selected West African States. In *Current Issues in Tourism* (Vol. 20, Issue 6, pp. 664–667). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1175421>
13. Subardini. (2017). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 1(2).
14. Sumardjo, S., Firmansyah, A., & Dharmawan, L. (2023). Social Transformation in Peri-Urban Communities toward Food Sustainability and Achievement of SDGs in the Era of Disruption. *Sustainability*, 15(13), 10678. <https://doi.org/10.3390/su151310678>
15. UNESCO. (n.d.). *Strategi pariwisata Berkelanjutan Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi tri Hita Karana* (UNESCO, Ed.). UNESCO Jakarta. Retrieved June 13, 2022, from http://www.unesco.or.id/publication/clt/STS_BALI_BAHASA.pdf
16. Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 35–44. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.35-44>
17. Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2019). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39–47.
18. Yoga Asmoro, A., Yusriza, F., & Pariwisata Nasional Banjarmasin, A. (2021). *POTENSI POLA PERJALANAN EKOWISATA JAWA TIMUR PASCA PANDEMI COVID-19*. 9(1), 2338–8633.

CALL FOR ARTICLE

▶ Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah (Jurnal Pradah) adalah jurnal dengan akses terbuka, diterbitkan 2 kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember.

▶ Jurnal Pradah mengundang Anda untuk mengirimkan artikel penelitian dan inovasi penelitian, tinjauan pustaka, dan karya ilmiah lainnya dengan berbagai tema yang berkaitan dengan masalah pembangunan daerah dan aspek perkembangannya.

▶ Panjang tulisan 35.000-38.000 karakter (tanpa spasi) dalam format .doc/ .docx atau .odt.

▶ Artikel wajib memuat judul, abstrak dan kata kunci dalam dua bahasa. Abstrak maksimal 250 kata dengan kunci 3-5 Frasa. Referensi minimal 10 jurnal atau prosiding bereputasi dalam sepuluh tahun terakhir dengan menggunakan manajemen referensi mendeley atau APA 7th Edition

▶ Mencantumkan nama lengkap, instansi/lembaga, *contact person*, dan email penulis. Naskah akan diseleksi oleh Tim Redaksi.

▶ Naskah dapat dikirim melalui:
<https://jurnalpradah.com/>

